**HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL**

**OLEH**

**DESY CHURUL AINI**

**REHULINA**

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas kehendakNya tim penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Hukum Ekonomi Internasional.

Buku ini dimaksudkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum ekonomi internasional, sehingga dapat dijadikan salah satu bahan kajian dalam salah satu cabang hukum internasional publik.

Buku ini membahas tentang Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Ekonomi Internasional; Subjek Hukum Ekonomi Internasional; Sumber Hukum Ekonomi Internasional; Sistem Perdagangan Internasional melalui mekanisme WTO; dan Masyarakat EkonomiASEAN (MEA).

Penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca guna menuju perbaikan-perbaikan isi dan substansinya.

Semoga Bermanfaat.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Tim Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Hukum Ekonomi Internasional

1. Definisi dan Istilah Hukum Ekonomi Internasional..................... 1
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Internasional....... 4
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional........................... 6
4. Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi Internasional............. 9

BAB 2 Subjek Hukum Ekonomi Internasional....................................... 13

1. Pengantar..................................................................................... 13
2. Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Internasional............... 14
3. Organisasi Ekonomi Internasional.............................................. 15

BAB 3 Sumber Hukum dalam Hukum Ekonomi Internasional

1. Pengantar.................................................................................... 49
2. Perjanjian Internasional.............................................................. 49
3. Kebiasaan Internasional............................................................. 50
4. Prinsip Hukum Umum................................................................ 51
5. Yurispridensi/Doktrin................................................................. 51
6. Resolusi...................................................................................... 52
7. Keputusan-keputusan................................................................. 53
8. Code of Conduct........................................................................ 53

BAB 4 Sistem Perdagangan Internasional melalui

Mekanisme WTO

A.Gambaran Umum WTO............................................................... 54

1.World Trade Organization (WTO)........................................... 54

2.Tujuan dan Fungsi WTO.......................................................... 56

3. Kewenangan dalam WTO....................................................... 58

B.Keanggotaan dalam WTO........................................................... 62

C.Penyelesaian Sengketa di WTO.................................................. 63

BAB 5 *Asean Economic Community* *(AEC*)/

Masyarakat Ekonomi ASEAN

1. Gambaran Umum ASEAN........................................................ 75
2. Fungsi dan Tujuan Pembentukan ASEAN................................ 79
3. Organ-Organ ASEAN................................................................. 81
4. Keanggotaan ASEAN................................................................. 82
5. Masyarakat Ekonomi ASEAN................................................... 86
6. Percepatan Pembentukan MEA 2015........................................ 93

**BAB 1**

**Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Internasional**

1. **Definisi dan Istilah Hukum Ekonomi Internasional**

Erler menggunakan dua pendekatan dalam merumuskan definisi tentang hukum ekonomi internasional: **Pertama,** pendekatan yang didasarkan pada asal hukum (norma) yang mengaturnya; dan **kedua**, mendasarkan kepada objek dari hukum internasional.

Menurut sarjana Jerman, Elder, pendekatan yang tepat adalah yang kedua. Berarti bahwa hukum nasional, hukum perdata dan hukum publik mengenai hubungan- hubungan.ekonomi internasional publik merupakan hukum ekonomi internasional.

Kemudian pendekatan yang dikemukan oleh John H. Jackson, beliau beranggapan bahwa: “*international economic Law could be defined as inculding all legal subjects which haveboth an international and an economic component.”* Pengertiannya yaitu bahwa hukum ekonomi internasional adalah semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi[[1]](#footnote-2)

Adapun George Scwarzerberger mengartikan hukum ekonomi internasional dengan  “*the branch of international public law which is concernedwith the ownership and exploitation of national resources,production and distribution of good, invisible internationaltransactions of an economic and financial character,currency and finance, related services and organization ofthe entities in such activities”*. Hukum ekonomi internasional sebagai bagian dari hukum internasional publik. Hukum tersebut mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan kepemilikan dan eksploitasi sumber daya nasional, produksi dan distribusi barang.[[2]](#footnote-3)

Sarjana lain yang termasuk dalam golongan ini adalah Louis Henkin dan Seidl-Hohenveldern merumuskan definisinya sebagai berikut: dalam pengertian luas, hukum ekonomi internasional adalah aturan-aturan hukum internasional publik yang secara langsung berkaitan dengan tukar-menukar ekonomi di antara subyek-subyek hukum internasional.

Menurut Verloren van Themaat, batasan yang luas sebagaimana dikemukakan oleh pelopornya Erler di atas tidak praktis untuk mempelajari bidang hukum ekonomi internasional. Beliau mengakui bahwa hubungan-hubungan ekonomi internasional dapat pula diatur oleh hukum kontrak dan norma-norma hukum perdata lainnya. Bahkan diakui pula bahwa hubungan-hubungan ekonomi internasional dapat juga diatur oleh hukum nasional publik.[[3]](#footnote-4)

Selain hukum ekonomi internasional, ada pula cabang-cabang baru hukum ekonomi internasioanl lainnya. Cabang-cabang ini timbul sebagai konsekuensi dari perkembangan transaksi-transaksi ekonomi internasional dewasa ini, seperti:

1. **Hukum Komersial Internasional**

Bidang hukum ini mengatur transaksi-transaksi oleh para pihak swasta.Yaitu, aturan-aturan hukum berupa prinsip-prinsip hukum perdata dan aspek-aspek perdata. Namun transaksi tersebut telah mengalami perkembangan yaitu bahwa dewasa ini transaksi-

transaksi komersial internasioanal demikian menjadi bahan kajian hukum internasional publik. Hal ini timbul karena sedikitnya tiga perkembagan berikut: **pertama**, akibat adanya peralihan urusan-urusan bisnis atau perdata yang diatur oleh adanya pertimbangan-pertimbangan komersial perdata kepada keikutsertaan negara dalam hubungan-hubungan demikian. **Kedua,** meningkatnya pengaturan-pengaturan internasioanal mengenai eksploitasi kekayaan alam seperti minyak- minyak dan pembangunan-pembangunan sarana umum. **Ketiga,** peranan perusahaan-perusahaan

multinasional yang berfungsi sebagai *quasi diplomatic* dalam transaksi-transaksi internasioanal

1. **Hukum Pembangunan Ekonomi Internasioanal**

Pendekatan terhadap bidang ini lebih menekankan kepada pendekatan politis dan sosiologis. Lord McNair mengemukakan sifat-sifat khusus dari perjanjian-perjanjian pinjaman internasional dari organisasi-organisasi internasioanal publik dan organisasi-organisasi keuangan nasioanal;

1. Perjanjian-perjanjian tersebut diadakan antara suatu pemerintah dan sebuah perusahaan asing;
2. Perjanjian-perjanjian tersebut biasanya mengatur eksploitasi kekayaan alam untuk jangka waktu lama;
3. Kerapkali pula perjanjian-perjanjian tersebut memberikan hak-hak yang tidak semata-mata kontraktual tetapi juga hak-hak kekayaan
4. Biasanya perjanjian-perjanjian tersebut memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada pihak swasta;
5. Perjanjian-perjanjian seperti ini diatur sebagian oleh hukum perdata dan sebagian oleh hukum publik;
6. Acapkali diatur pula mengenai perlindungan dari negara dimana perusahaan induk berada;
7. Biasanya tidak banyak persamaan antara system hukum negara penerimaan dengan sistem hukum dari negara dimana perusahaan tersebut berada;
8. Seringkali sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut diselesaikan oleh badan arbitrase
9. **Hukum Pembangunan Internasional *(International Development Law)***

Lahirnya bidang baru ini sejalan dengan berkembangnya hubungan-hubungan ekonomi internasional dalam bentuk pengaturan-pengaturan yang semakin kompleks.Pengaturan-pengaturan demikian biasanya dibuat guna kepentingan- kepentingan ekonomi negara-negara yang kurang maju. Pengaturan-pengaturan itu dituangkan kedalam berbagai bentuk perjanjian: deklarasi, Final Acts, resolusi atau rekomendasi-rekomendasi.[[4]](#footnote-5)

1. **Hukum Transaksi Bisnis Internasional**

Hukum transaksi bisnis internasional adalah hukum yang dipergunakan sebagai dasar transaksi bisnis lintas batas Negara, yaitu perangkat kaidah, asas-asas, dan ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi bisnis dalam hubungan objek transaksi, prestasi para pihak, serta segala akibat yang timbul dari akibat transaksi.[[5]](#footnote-6)

1. **Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Internasional**
2. **Tujuan hukum ekonomi internasional**

Tujuan hukum ekonomi internasional dapat diklasifikasikan secara beragam, antara lain sebagai berikut:[[6]](#footnote-7)

1. Tujuan ekonomis, mewujudkan peningkatan standar hidup, adanya penciptaan lapangan kerja, dan untuk mewujudkan kesejahterraan masyarakat dunia. Hal yang penting adalah bagaimana tujuan ekonomi tersebut dapat diperoleh oleh semua negara secara adil, bukan hanya sekelompok kecil negara-negara tertentu. Tantangan terbesar dari tujuan ekonomis hukum ekonomi internasional adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat masyarakat internasional.
2. Mengembangkan proses pembangunan negara berkembang (*development process in developing countries*). Tujuan untuk membantu mengembangkan proses pembangunan ekonomi negara-negara berkembang menjadi salah satu harapan yang harus senantiansa dievaluasi dan untuk diwujudkan. Kesenjangan antara pembangunan negara-negara maju dan negara-negara berkembang terasa semakin lebar. Menjadi tantangan tersendiri, bagaimana mewujudkan hukum ekonomi internasional demi kemajuan dan pengembangan pembangunan bagi negara berkembang.
3. Mengharoniskan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan ekonomi internasional ekonomi internasional. Pada umumnya, harmonisasi kebijakan dan hukum yang terjadi lebih ditujukan pada kepentingan negara maju.
4. **Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Internasional**

Ruang lingkup hukum ekonomi internasional dapat di bedakan menjadi dua ruang lingkup, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi internasional (definisi secara sempit). Menurut konsep sempit *(narrow),* merupakan bagian dari hukum internasional public. Tampaknya, klasifikasi ini pada awalnya mungkin masih bisa diterima. Namun untuk saat ini ketika perkembangan hukum ekonomi internasional sudah sedemikian pesat, tidaklah mungkin hanya membatasi pengertian pada pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi internasional pada sebatas bagian hukum internasional public.
2. Hukum ekonomi internasional (definisi secara luas). Menurut konsep luas *(broad),* merupakan cabang hukum yang membahas aspek komersial (privat), mengkaji semua fenomena ekonomi internasional (termasuk investasi, moneter, pembangunan, bahkan aspek lingkungan, dan perburuhan). Klasifikasi kedua ini lebih luas dari pengertian dan ruang lingkup yang pertama. [[7]](#footnote-8)
3. **Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Internasional**

Prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi internasional pada pokoknya mengacu kepada 2 prinsip kebebasan.yakni kebebasan komunikasi dan kebebasan berdagang. Prinsip

kebebasan yang telah berkembang lama ini disebut juga sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional.

1. **Kebebasan Berkomunikasi**

Prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan siapa pun juga.Termasuk kebebasan untuk memasuki wilayah suatu negara guna melakukan transaksi-transaksi ekonomi internasional. Seperti

navigasi, kebebasan transit, kebebasan melakukan perjalanan melalui darat, kereta api, atau pengangkutan udara. Implementasi kebebasan berlayar, dalam pasal-pasal Konvensi Hukum Laut 1982 (*the UnitedNation Convention on the Law of the sea*). Pasal 87 Konvensi mengenai kebebasan dilaut lepas antara lain menegaskan bahwa semua negara memiliki hak untuk berlayar. Kebebasan di ruang udara ini tampak nyata dalam “*five freedoms of the air”*yang termuat dalam *theChicago International Air Transport Agreement* (1944). Kebebasan tersebut yaitu:

1. Terbang melintasi wilayah negara asing tanpa mendarat;
2. Mendarat untuk tujuan-tujuan komersial;
3. Menurunkan penumpang pada lalu-lintas negara asing yang berasal dari negara asal pesawat udara;
4. Mengangkut penumpang pada lalu-lintas negara asing yang bertujuan ke negara asal pesawt udara; dan Mengangkut angkutan antara dua Negara asing
5. **Kebebasan Berdagang**

Setiapa negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan setiap orang atau setiap negara dimanapun di dunia ini. Kebebasan ini tidak boleh terhalang oleh karena negara memilki system ekonomi, ideologi atau politik yang berbeda dengan negara lainnya.

1. **Kaidah Dasar Minimum (*minimum standards)***

Kaidah utama dalam hukum ekonomi internasional.kaidah yang telah berkembang

menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional umum (general international

customary law). Kaidah ini menyatakan, kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya.

1. **Perlakuan Sama (*IdenticalTreatment)***

Berdasarkan prinsip ini, dua raja bersepakat untuk secara timbal balik memberikan para pedagang mereka perlakuan yang sama (identik). Menurut Schwarzenberger, hukum kekebalan diplomatik yang juga menganut prinsip timbal-

balik. Kaidah dasar ini lebih terkenal dengan istilah resiprositas (*reciprocity*).Oliver Long menganggap resiprositas sebagai suatu prinsip fundamental dalam perjanjian GATT.

1. **Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Nasional *(National Treatment)***

Merupakan salah satu pengejewantahan dari prinsip non-diskriminasi.Klausul ini ditemukan dalam berbagai perjanjian termasuk dalam GATT dan perjanjian-perjanjian persahabatan, perdagangan dan navigasi. Klausul ini mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan hukum yang sama[[8]](#footnote-9)

1. **Most-Favoured Nation (MFN)**

Pada dasarnya ,erupakan prinsip nondiskriminasi yang mensyaratkan negara anggota harus memperlakukan negara sama dengan bagaimana dia memperlakukan negara lain. Prinsip MFN ini mempunyai dua bentuk, MFN bersyarat dan MFN tidak bersyarat. Berdasarkan kewajiban bersyarat, apabila suatu negara memberi keistimewaan pada negara ketiga, maka ia diwajibkan memberikan perlakuan yang sama kepada negara partnernya. Hal itu dilakukan setelah negara partner tersebut memberikan perlakuan istimewadengan menyepakati keuntungan timbal balik yang sama kepada mereka yang telah di berikan negara pertama.

Klausul MFN tidak bersyarat mensyaratkan suatu negara yang memberikan keistimewaan kepada negara ketiga secara otomatis.Dan, tanpa syarat meberikan keistimewaan pada negara partnernya, tanpa perlu syarat resiprositas dari negara partner.

1. **Asas Tidak Merugikan Negara Lain**

Dalam perjanjian internasional di bidang ekonomi telah diakui adanya suatu kewajiban negara untuk tidak menimbulkan beban-beban ekonomi kepada negara lain, karena adanya kebijaksanaan ekonomi domestik negara yang bersangkutan. Artinya, suatu negara tidak diperbolehkan (walaupun untuk kepentingan ekonomi nasionalnya) mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan negara lain.

1. **Asas Tindakan Pengaman dan Klausul Penyelemat (*Safeguards and Escape Clause*)**

Masyarakat internasional umumnya menyadari bahwa kadangkala aturan-aturan dalam perjanjian internasional mengenai hubungan ekonomi terlalu memberatkan negara.Jika negara tersebut harus menerapkannya dikhawatirkan timbul dampak negatif terhadap perekonomian negaranya.Untuk menghindari hal tersebut di buatlah suatu klausul penyelamat. Biasanya, klausul semacam itu memberikan kemungkinan kepada negara dalam melakukan penangguhan terhadap kewajiban internasional yang harus dilakukannya untuk jangka waktu tertentu.

1. **Asas preferensi terhadap Negara Berkembang**

Asas ini menyatakan tentang perlunya kelonggaran-kelonggaran atas aturan hukum bagi negara-negara yang sedang berkembang.Artinya, negara-negara tersebut perlu mendapat perlakuan khusus bila negara-negara maju berhubungan dengan mereka.Dasar teori sistem preferensi ini yakni negara diperbolehkan menyimpang dari kewajiban MFN. Tujuannya untuk memperbolehkan mereka ,mengurangi tingkat tariff pada impor barang manakalabarang-barang tersebut berasal dari negara berkembang. Hal tersebut untuk memberikan suatu keuntungan kompetitif kepada negara berkembang dalam masyarakat industry yang menjadi sasaran ekspor.

1. **Asas Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Asas ini diperkenalkan oleh John H. Jackson.Dalam perjanjian internasional negara seringkali mencantumkan cara-cara damai, misalnya negosiasi atau konsultasi.Kemudian, jika kedua cara tersbeut gagal, negara-negara cenderung untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada pihak ketiga yang netral, misalnya arbitrase.[[9]](#footnote-10)

1. **Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi Internasional**
2. **Sebelum Perang Dunia II**

Menurut ***Verlorent van Themaat***, hukum ekonomi internasional berkembang pada abad 21. Klausul-klausul *“most-favoured-nation*” (MFN) treatment dan *“resiprositas”*(timbal balik) sudah pula dikenal.Klausul MFN pertama yang didasarkan pada suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Burgundy pada 17 Agustus 1417.Di abad ini prinsip-prinsip hukum laut turut pula memberi sumbgangan penting sebagai cikal bakal lahirnya hukum ekonomi internasional, misalnya prinsip kebebasan berlayar *(freedom navigation)*dan prinsip kebebasan menangkap ikan di laut lepas.Selain itu juga ada prinsip *cabotage*, prinsip ini merupakan hak bagi negara pantai untuk membolehkan atau tidak, kapal asing berlayar mengangkut barang.

Pada masa ini hukum ekonomi internasional umumnya yang berupa klausul-klausul MFN tertuang dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral mengenai perdagangan dan navigasi.

Pada tahun 1914 gambaranya telah berubah, campur tangan negara mulai tampak.

Ditandai pula dengan upaya-upaya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) melakukan studi-studi ekstensif mengenai klausul-klausul MFN dan masalah-masalah perdagangan lainya. Antara lain studi terhadap klausul yang termuat pada suatu konvensi yang ditandatangani pada tanggal 5 Juli 1980 mengenai publikasi tarif-tarif cukai (*customs tariffs*).

LBB juga mensponsori studi-studi mengenai formalitas-formalitas pajak (*customs)* diantara tahun 1923 dan 1936. Prinsip-prinsip yang dibahas dalam studi-studi ini kemudian menjadi landasan bagi perjanjian-perjanjian ekonomi internasional setelah Perang Dunia II, misalkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)

**B. Pasca Perang Dunia II: *Bretton Woods System***

Pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga ekonomi internasional guna mengisi tujuaan kebijakan perekonomian internasional. Tujuan itu melahirkan diselenggarakanya konferensi *Bretton Woods*(1944) dan pendirian *International Monetary Fund*(IMF) dan*International Bank For Reconstuction and Development* (IBRD).

Setelah berdirinya PBB tahun 1945, salah satu tindakan pertamanya adalah mempersiapkan konferensi yang bertugas merancang suatu Piagam Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization /*ITO), piagam ini pun berhasil disahkan di Havana pada 1948, namun tidak berlaku karena Kongres Amerika Serikat tidak menyetujuinya.

Pada masa ini juga telah dirundingkan mengenai pembentukan GATT, namun ketika ITO gagal, GATT kemudian dijadikan sebagai suatu organisasi internasional yang diberlakukan dengan *Protocol of Provisional Application*yang ditandatangani pada 1947, dengan ini GATT merupakan perjanjian internasional yang mengikat. Namun pada kenyataanya GATT sendiri tidak memenuhi syarat sebagi suatu organisasi.Begitu pula denganm*Protokol of Provosional Application* yang dalam ketentuan-ketentuanya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam GATT.Lembaga-lembaga ekonomi internasional dalam bidang uang dan perdagangan ini yaitu IMF dan IBRD serta GATT dianggap sebagai pembentuk *Bretton Woods System*.

Pada tahun 1960 telah lahir *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) guna mengelola bantuan Marshall Plan. Dalam perkembanganya, oleh AS diperluas mencaku rekonstruksi atas eropa setelah Perang Dunia II. Dalam dewasa ini malah memainkan peran penting guna membahas dan merumuskan prinsip-prinsip tindakan negara maju dalam  transaksi ekonomi internasional. Keanggotaan OECD mencakup negara-negara industri seperti Jepang, negara-negara Eropa Barat, AS, Kanada, Australia dan Selandia Baru.  Badan-Badan lain juga telah pula diprakarsai dan dibentuk oleh PBB sehingga dewasa ini cukup banyak organisasi ekonomi internasional membentuk kerangka yang menjadi landasan dibentuknya hukum ekonomi internasional. Dalam hal ini badan khusus yang penting adalah *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang memainkan peran penting dalam mewakili negara-negara yang sedang berkembang.

Pada mulanya *Breeton Woods System*ini kurang mendapat sambutan dari negara-negara Eropa Timur termasuk Uni Soviet, juga negara-negara berkembang dan miskin.Sistem ini dianggap hanya cocok untuk negara penganut pasar bebas, dan kurang memperhatikan kepentingan dan permasalahan negara-negara berkembang.Banyaknya kritik, maka lahirlah UNCTAD yang berperan sebagai juru bicara demi kepentingan negara-negara berkembang.

**C. Pasca Perang Dingin**

Ditandai dengan adanya perubahan politik dan ekonomi. Perubahan politik tampak pada proses demokrasi di negara-negara Eropa Timur dan Amerika Latin. Umumnya proses kearah demokratisasi ini baru muncul apabila ada pertumbuhan basis ekonomi yang stabil, dan basis ekonomi yang demikian terbentuk manakala hukum ekonomi internasional dapat menciptakan suatu pasar terbuka dan kompetitif.

Peran hukum ekonomi internasional di masa ini ditandai dengan kecenderungan-kecenderungan sbb:

1. Semakin berperanya organisasi-organisasi internasional yang melahirkan perjanjian-perjanjian internasional guna mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi internasional
2. Seiring dengan semakin kompleksnya hubungan-hubunga atau transaksi ekonomi internasional dewasa ini telah mengakibatkan semakin kompleksnya aturan-aturan hukum ekonomi  internasional yang mengaturnya.
3. Konsekuensi lain dari semakin intensifnya transaksi-transaksi ekonomi internasional telah menyebabkan timbulnya sengketa-sengketa perdagangan antar negara. Kecenderungan ini telah melahirkan suatu perangkat hukum ekonomi internasional mengenai penyelesaian sengketa guna mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan tersebut.
4. Berkaitan dengan kedudukan hukum ekonomi internasioanl dalam tatanan hukum nasional di negara-negara di dunia. Fenomena yang muncul adalah negara-negara mau tidak mau memaksakan diri untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan aturan-aturan hukum ekonomi internasional.[[10]](#footnote-11)

**BAB 2**

**Subjek Hukum Ekonomi Internasional**

1. **Pengantar**

Tujuan utama dari pembelajaran hukum ekonomi internasional adalah untuk memperkenalkan topik utama mengenai perdagangan global, sehingga focus utama dari hukum ekonomi internasional adalah pengaturan mengenai hubungan antar subjek hukum ekonomi internasional.

Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam hukum. Hikmahanato dalam tulisannya membagi subjek hukum kepada bidang bidang hukum, dengan jelas belau mengakataan bahwa; subyek hukum perdata adalah orang dan badan hukum; subyek hukum pidana adalah negara dengan pelaku tindak pidana (orang dan badan hukum); subyek hukum tata negara adalah penguasa/pemerintah (lembaga-lembaga Negera) dengan rakyat; subyek hukum administrasi negara adalah pejabat negara dengan rakyat; dan subyek hukum Internasional adalah Negara, organisasi internasional, palang merah internasional, kota vatikan, belligerent dan Individu (namun terbatas kejahatan internasional).[[11]](#footnote-12)

Lebih lanjut, subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum ekonomi internasional; pemegang *privilege procedural* untuk mengajukan tuntutan dimuka pengadilan internasional; dan pemilik kepentingan-kepentingan untuk mana dibuat ketentuan oleh hukum internasional.[[12]](#footnote-13)Maka jika mengacu kepada kedua defenisi sebhek hukum yang disampaikan oleh Hikamhanto dan JG. Starke maka dapat dikatakan yang menjadi subjek hukum ekonomi internasional adalah entitas-entitas antara subjek hukum internasional dengan ketentuan internasional dalam perdagangan global dan apabila di detailkan, maka yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional adalah; negara, organisasi ekonomi internasional, individu dan multinational korporations.

1. **Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Internasional**

1.Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang tertua dan sangat penting. Meskipun negara merupakan subjek hukum internasional utama, namun pada perkembanganya subjek hukum internasional menjadi semakin luas, Mochtar Kusumaadmadja dalam defenisinya mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan asas dan kaidah yang mengatur hubungan hukum diantara subjek hukum intenasional, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum internasional lainnya[[13]](#footnote-14)maka yang menjadi subjek hukum internasional tidak hanya negara. Tapi memang negara merupakan actor utama dalam hubungan internasional.

Pasal 1 Konvensi Montevidio Tahun 1933, memberika syarat suatu entitas dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur;

1. Memiliki penduduk
2. Memiliki wilayah tertentu
3. Memiliki pemerintahan yang berdaulat
4. Memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Pada perkembangannya saat ini, negara sebagai subjek hukum ekonomi internasional meliputi negara merdeka baik yang berbentuk federasi maupun republik. Walaupun negara-negara pada umumnya berbeda dalam luas wilayah, penduduk, kekayaan, kekuatan dan kebudayaan, namun dalam hukum internasional dikenal ajaran persamaan kedudukan negara-negara.

1. **Organisasi Ekonomi Internasional**
2. World bank
3. Pengantar

Bank Dunia *The International bank for Reconstruction and Development* (IBRD), bersama-sama dengan Dana moneter internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) di bentuk pada konferensi Bretton Woods, pada 1-22 juli 1944. Badan ini mulai resmi berdiri pada 27 desember 1945.[[14]](#footnote-15)

Bank Dunia beserta *International Development Association* (IDA) dan *The International Finance Coorperation* (IFC) disebut sebagai *the World Bank Group*. Dalam *the World bank Group* ini tergabung pula ICSID (*International Centre for settlement of Investment Disputes*). Pada tahun 1947, Badan ini resmi menjadi badan khusus PBB. Kantor utaamanya bermarkas di Amerika Serikat di kota Washington D.C.

1. Tujuan Dibentuknya Bank Dunia

Tujuan Utamanya tercantum dalam Pasal 1 *Articles of Agreement* yaitu[[15]](#footnote-16):

1. Membantu pembangunan Negara-negara anggota;
2. Memajukan penanaman modal asing;
3. Memberikan bantuan pinjaman keuangan untuk tujuan-tujuan produktif;
4. Memajukan pertumbuhan perdagangan internasional dan memelihara neraca pembayaran;
5. Mengelola pinjaman untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan mendesak; dan
6. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnyadengan memperhatikan akibat-akibat penanaman modal internasional pada kondisi-kondisi bisnis di wilayah keanggotaannya.
7. Misi

Untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim:

1. Dengan mengurangi pangsa populasi global yang hidup dalam kemiskinan ekstrim sampai 3 persen pada tahun 2030.
2. Untuk mempromosikan kemakmuran bersama:
3. Dengan meningkatkan pendapatan 40 persen orang termiskin di setiap negara.
4. Keanggotaan[[16]](#footnote-17)

Hanya Negara-negara yang telah menjadi anggota IMF saja yang dapat menjadi anggota Bank dunia.Sampai dengan 2002, sebanyak183 negara telah menjadi anggotanya.Indonesia menjadi anggota dunia dan IMFdengan mengajukan permohonan menjadi anggota pada 24 juli 1950. Permohonan ini diterima 3 tahun kemudian pada pertengahan 1953.keanggotaan RI dalam Bank Dunia dan IMF dituangkan dalam UU No. 5 tahun 1954 tanggal 12 januari 1954.

1. Organisasi[[17]](#footnote-18)

Bank Dunia seperti koperasi, terdiri dari 189 negara anggota. Negara-negara anggota ini, atau pemegang saham, diwakili oleh Dewan Gubernur, yang merupakan pembuat kebijakan tertinggi di Bank Dunia.Umumnya gubernur adalah menteri keuangan atau menteri pembangunan negara anggota.Pertemuan rutin dilaksanakan setahun sekali pada acara Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Gubernur mendelegasikan tugas khusus kepada 25 Direktur Eksekutif, yang bekerja di tempat di Bank.Lima pemegang saham terbesar menunjuk seorang direktur eksekutif, sementara negara anggota lainnya diwakili oleh direktur eksekutif terpilih.

Bank Dunia beroperasi dari hari ke hari di bawah kepemimpinan dan arahan presiden, manajemen dan staf senior, dan wakil presiden yang menangani Global Practices, Cross-Cutting Solutions Areas, daerah, dan fungsi.

Saat ini (2017) World Bank di Pimpin oleh Jim Yong Kim,Presiden dipilih oleh Dewan Direktur Eksekutif untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, salah satu tugasnya adalah memimpin rapat Dewan Direksi dan bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan Bank.

Direktur Eksekutif membentuk Dewan Direksi Bank Dunia.Pertemuan rutin dilaksanakan setidaknya dua kali seminggu untuk mengawasi bisnis Bank, termasuk persetujuan pinjaman dan jaminan, kebijakan baru, anggaran administratif, strategi bantuan negara dan keputusan peminjaman dan keuangan.

1. *World Trade Organization*
2. Gambaran Umum *World Trade Organization* (WTO) [[18]](#footnote-19)

Perjanjian perdagangan dunia yang di bentuk berdasarkan Persetujuan pembentukan *World Trade Organization* (WTO)[[19]](#footnote-20) yang ditanda-tanggani pada tahun 1994 dan berlaku sejak 1 Januari 1995, mengatur mengenai perjanjian perdagangan dunia.WTO telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu organisasi internasional yang paling penting dan berpengaruh dalam hubungan ekonomi dan pembangunan antarbangsa.[[20]](#footnote-21) Lembaga perdagangan internasional yang mengembangan lembaga *General Agreement on tariff and Trade (*GATT) ini memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan menjaga agar segala kesepakatan perdagangan bebas yang baru maupun yang lama tetap berjalan dengan baik, mengawasi praktik-praktik yang berkembang di dalam perdagangan dunia, dan menyelesaikan sengketa dagang yang timbul diantara sesama negara anggota. Kesepakatan yang di atur dalam WTO lebih luas dari pengaturan dalam GATT, GATT sejak awal hanya mengatur perdagangan barang (*tariff*) sedangkan dalam perjanjian WTO selain mengatur perdagangan barang namun juga mengatur perdagangan jasa (*Trade in Services)*, perlindungan terhadap HAKI (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* dan perjanjian penanaman modal.[[21]](#footnote-22) WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah;

“bahwa hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar-ngejar tujuan ini diakui adanya sesuatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya”[[22]](#footnote-23)

Adapun peraturan-peraturan dalam WTO berlaku bagi seluruh anggota WTO dan tidak akan ada perubahan kebijakan yang sifatnya mendadak sehingga memungkinkan setiap pemerintah negara-negara anggotanya menjalankan perdagangan internasional tanpa hambatan, dengan kata lain, berbagai aturan atau kebijakan yang dibuat atau akan di buat bersifat transparan dan dapat diprediksikan.[[23]](#footnote-24)Diantara fungsi WTO yang terpenting adalah melancarkan pelaksanaan, pengadministrasian serta lebih meningkatkan tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sendiri serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya. Di samping itu WTO akan merupakan forum negoisasi bagi para anggotanyadi bidang-bidang yang menyangkut perdagangan multilateral, forum penyelesaian sengketa, dan melaksanakan peninjauan atas kebijakan perdagangan (pasal III: 1,2,3,4).[[24]](#footnote-25)

1. Fungsi WTO[[25]](#footnote-26)
2. Mengelola perjanjian perdagangan WTO;  
   • Forum for trade negotiations
3. Forum untuk negosiasi perdagangan;  
   • Handling trade disputes
4. Menangani perselisihan perdagangan;  
   • Monitoring national trade policies
5. Memonitor kebijakan perdagangan nasional;  
   • Technical assistance and training for developing countries
6. Bantuan teknis dan pelatihan untuk negara-negara berkembang;dan  
   • Cooperation with other international organizations
7. Kerjasama dengan organisasi internasional lainnya.
8. Cara bergabung dengan WTO: proses aksesi [[26]](#footnote-27)

Any state or customs territory having full autonomy in the conduct of its trade policies may join (“accede to”) the WTO, but WTO members must agree on the terms.Setiap wilayah negara bagian atau pabean yang memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya dapat bergabung ("menyetujui") WTO, namun anggota WTO harus menyetujui persyaratan-persyaratan.Secara umum aplikasi berjalan melalui empat tahap:

First, “tell us about yourself” .Pertama, "ceritakan tentang diri sendiri". The government applying for membership has to describe all aspects of its trade and economic policies that have a bearing on WTO agreements.Pemerintah yang mengajukan keanggotaan harus menggambarkan semua aspek kebijakan perdagangan dan ekonominya yang memiliki kaitan dengan kesepakatan WTO. This is submitted to the WTO in a memorandum which is examined by the working party dealing with the country's application.Hal ini disampaikan ke WTO dalam memorandum yang diperiksa oleh pihak pekerja yang menangani aplikasi negara tersebut. These working parties are open to all WTO members.Pihak-pihak kerja ini terbuka untuk semua anggota WTO.

**Second, “work out with us individually what you have to offer”.**Kedua, "bekerja sama dengan kita secara individu apa yang Anda tawarkan"**.**When the working party has made sufficient progress on principles and policies, parallel bilateral talks begin between the prospective new member and individual countries.Ketika pihak pekerja telah membuat kemajuan yang memadai mengenai prinsip dan kebijakan, perundingan bilateral paralel dimulai antara calon anggota baru dan masing-masing negara. They are bilateral because different countries have different trading interests.Mereka bilateral karena negara yang berbeda memiliki kepentingan perdagangan yang berbeda.These talks cover tariff rates and specific market access commitments, and other policies in goods and services. Pembicaraan ini mencakup tingkat tarif dan komitmen akses pasar yang spesifik, dan kebijakan lain dalam barang dan jasa. The new member's commitments are to apply equally to all WTO members under normal [non-discrimination rules](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm&usg=ALkJrhiEg4v_kHFOmgL4V0vAJmEhY5mPLA#mfn) , even though they are negotiated bilaterally. Komitmen anggota baru tersebut berlaku sama untuk semua anggota WTO di bawah [peraturan non-diskriminasi yang](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm&usg=ALkJrhiEg4v_kHFOmgL4V0vAJmEhY5mPLA#mfn) normal, walaupun mereka dinegosiasikan secara bilateral. In other words, the talks determine the benefits (in the form of export opportunities and guarantees) other WTO members can expect when the new member joins. Dengan kata lain, perundingan menentukan manfaat (dalam bentuk peluang dan jaminan ekspor) anggota WTO lainnya dapat mengharapkan kapan anggota baru bergabung. (The talks can be highly complicated. It has been said that in some cases the negotiations are almost as large as an entire round of multilateral trade negotiations.) (Perundingan bisa sangat rumit) Dikatakan bahwa dalam beberapa kasus negosiasi hampir sama besarnya dengan keseluruhan perundingan perdagangan multilateral.)

Third, “let's draft membership terms” .Ketiga, "mari kita konsep persyaratan keanggotaan" .Once the working party has completed its examination of the applicant's trade regime, and the parallel bilateral market access negotiations are complete, the working party finalizes the terms of accession.Begitu pihak pekerja menyelesaikan pemeriksaan rezim perdagangan pemohon, dan negosiasi akses pasar bilateral paralel selesai, partai pekerja menyelesaikan persyaratan aksesi.These appear in a report, a draft membership treaty (“protocol of accession”) and lists (“schedules”) of the member-to-be's commitments.Ini muncul dalam sebuah laporan, sebuah rancangan perjanjian keanggotaan ("protokol aksesi") dan daftar ("jadwal") komitmen anggota.

Finally, “the decision” .Akhirnya, "keputusan" .The final package, consisting of the report, protocol and lists of commitments, is presented to the WTO General Council or the Ministerial Conference.Paket terakhir, yang terdiri dari laporan, protokol dan daftar komitmen, dipresentasikan ke Dewan Umum WTO atau Konferensi Tingkat Menteri.If a two-thirds majority of WTO members vote in favour, the applicant is free to sign the protocol and to accede to the organization.Jika dua pertiga mayoritas anggota WTO memilih, pemohon bebas menandatangani protokol dan menyetujui organisasi tersebut.In many cases, the country's own parliament or legislature has to ratify the agreement before membership is complete.Dalam banyak kasus, parlemen atau legislatif negara tersebut harus meratifikasi kesepakatan sebelum keanggotaan selesai.

1. **Sejarah WTO**[[27]](#footnote-28)

Setelah Perang Dunia II, Inggris dan Amerika Serikat mengajukan proposal ke Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pembentukan badan perdagangan internasional yang diberi nama Organisasi Perdagangan Internasional (ITO).That is, perhaps, why the GATT is often referred to as a UN related body and its documents are sometimes mistakenly referred to as UN documents. Mungkin, mengapa GATT sering disebut sebagai badan terkait PBB dan dokumen-dokumennya kadang-kadang secara keliru disebut dokumen PBB.

ECOSOC convened a conference, the United Nations Conference on Trade and Employment in 1946 to consider the UK and US proposals.ECOSOC mengadakan konferensi, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Ketenagakerjaan pada tahun 1946 untuk mempertimbangkan proposal Inggris dan AS.A Preparatory Committee drafted the ITO Charter and it was approved in 1948 at the conference in Havana, Cuba. Sebuah Panitia Persiapan menyusun Piagam ITO dan disetujui pada tahun 1948 pada konferensi di Havana, Kuba.The Charter is often referred to as the Havana Charter or the ITO Charter. Piagam ini sering disebut Piagam Havana atau Piagam ITO.

The first round of trade negotiations took place while the Preparatory Committee was still working on drafting the Charter because the participants were anxious to begin the process of trade liberalization as soon as possible.

Putaran pertama perundingan perdagangan berlangsung saat Panitia Persiapan masih mengerjakan penyusunan Piagam karena para peserta sangat ingin memulai proses liberalisasi perdagangan sesegera mungkin.Their results were incorporated into the General Agreement, which was signed in 1947. Hasilnya dimasukkan ke dalam Perjanjian Umum, yang ditandatangani pada tahun 1947.

Since the original signatory nations expected the Agreement to become part of the more permanent ITO Charter, the text of the GATT contains very little "institutional" structure.

Karena negara penanda tangan asli mengharapkan Perjanjian tersebut menjadi bagian dari Piagam ITO yang lebih permanen, teks GATT berisi struktur "kelembagaan" yang sangat kecil.This lack of detail within the agreement has created increasing difficulties as the GATT membership and roles governing trade between so many of the world's nations have grown. Kurangnya detail dalam kesepakatan ini telah menciptakan kesulitan yang meningkat karena keanggotaan dan peran GATT yang mengatur perdagangan antara banyak negara di dunia berkembang.The GATT has functioned as an international organization for many years even though it has never been formalized as such. GATT telah berfungsi sebagai organisasi internasional selama bertahun-tahun meskipun tidak pernah diformalkan seperti itu.

ECOSOC established an Interim Commission for the ITO that is referred to as ICITO.

ECOSOC membentuk Komisi Interim untuk ITO yang disebut ICITO.Unfortunately, when it came time for the members to ratify the ITO Charter, the Congress of the United States refused and the ITO never became a reality. Sayangnya, ketika tiba saatnya bagi anggota untuk meratifikasi Piagam ITO, Kongres Amerika Serikat menolak dan ITO tidak pernah menjadi kenyataan.The GATT survived, but remained intact only due to the Protocol of Provisional Application of the General Agreement on Tariffs and Trade which was concluded in 1947 and which entered into force in 1948. GATT bertahan, namun tetap utuh hanya karena Protokol Penerapan Sementara atas Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang disimpulkan pada tahun 1947 dan mulai berlaku pada tahun 1948.

The GATT completed 8 rounds of multilateral trade negotiations (MTNs).

GATT menyelesaikan 8 ronde negosiasi perdagangan multilateral (MTNs).The Uruguay Round (the 8 th round) concluded with the signing of the Final Act on April 15, 1994, in Marrakesh, and produced the World Trade Agreement (WTO) and its annexes. Putaran Uruguay (ronde ke- 8) diakhiri dengan penandatanganan Akta Akhir pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, dan menghasilkan World Trade Agreement (WTO) dan lampirannya.

1. **Anggota World Trade Organisation[[28]](#footnote-29)**

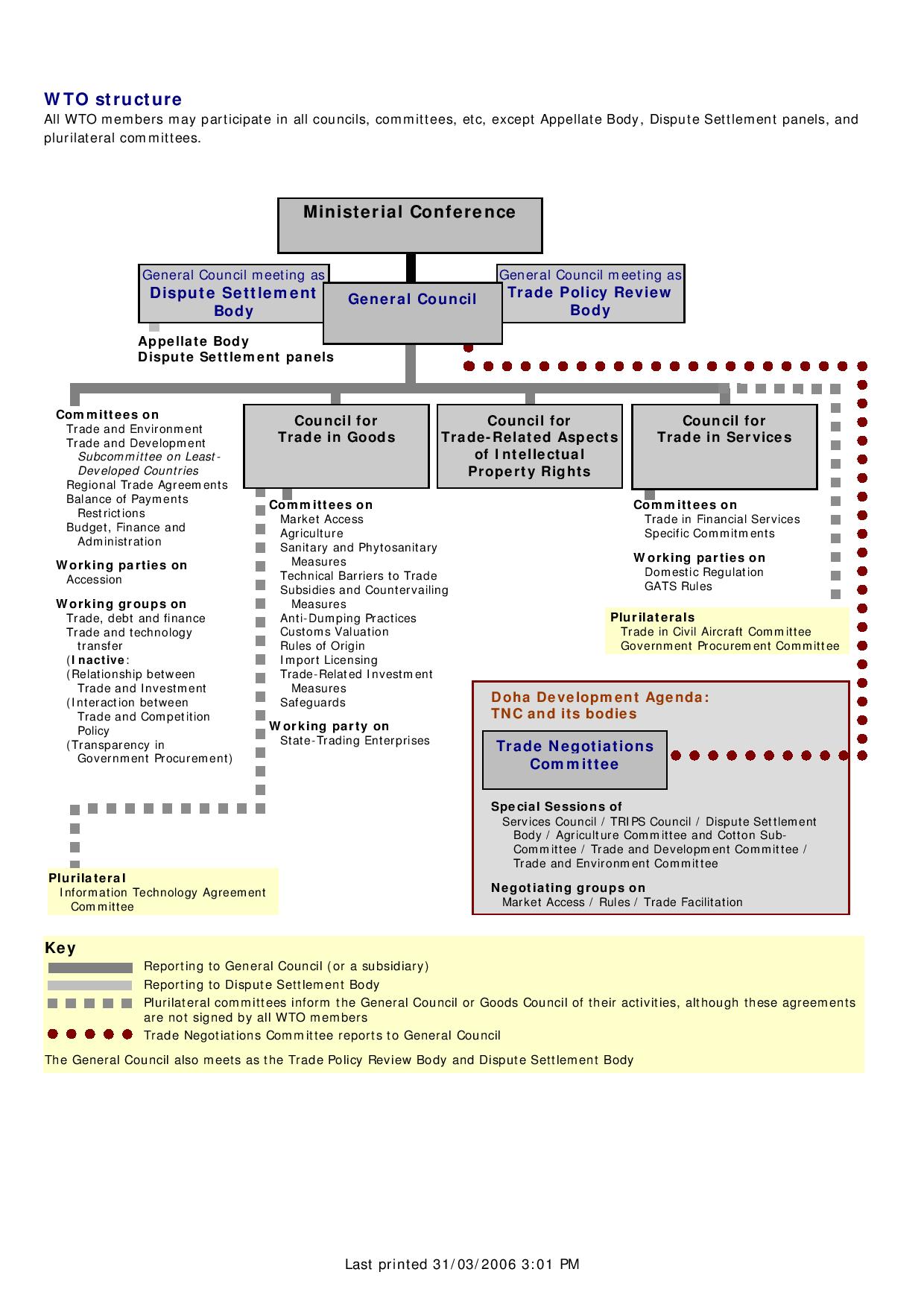
Hingga 29 Juli 2016 negara yang tergabung dalam WTO sebanyak 164  anggota, yaitu, [**Afghanistan**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/afghanistan_e.htm) — 29 July 2016, [**Albania**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/albania_e.htm) — 8 September 2000, [**Angola**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/angola_e.htm) — 23 November 1996, [**Antigua and Barbuda**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/antigua_and_barbuda_e.htm) — 1 January 1995, [**Argentina**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/argentina_e.htm) — 1 January 1995, [**Armenia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/armenia_e.htm) — 5 February 2003, [**Australia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/australia_e.htm) — 1 January 1995, [**Austria**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/austria_e.htm) — 1 January 1995, [**Bahrain, Kingdom of**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/bahrain_e.htm) — 1 January 1995, [**Bangladesh**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/bangladesh_e.htm) — 1 January 1995, [**Barbados**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/barbados_e.htm) — 1 January 1995, [**Belgium**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/belgium_e.htm) — 1 January 1995, [**Belize**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/belize_e.htm) — 1 January 1995, [**Benin**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/benin_e.htm) — 22 February 1996, [**Bolivia, Plurinational State of**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/bolivia_e.htm) — 12 September 1995, [**Botswana**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/botswana_e.htm) — 31 May 1995, [**Brazil**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/brazil_e.htm) — 1 January 1995, [**Brunei Darussalam**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/brunei_darussalam_e.htm) — 1 January 1995, [**Bulgaria**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/bulgaria_e.htm) — 1 December 1996, [**Burkina Faso**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/burkina_faso_e.htm) — 3 June 1995, [**Burundi**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/burundi_e.htm) — 23 July 1995, [**Cabo Verde**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cape_verde_e.htm) — 23 July 2008, [**Cambodia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cambodia_e.htm) — 13 October 2004, [**Cameroon**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cameroon_e.htm) — 13 December 1995, [**Canada**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/canada_e.htm) — 1 January 1995, [**Central African Republic**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/central_african_republic_e.htm) — 31 May 1995, [**Chad**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chad_e.htm) — 19 October 1996, [**Chile**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chile_e.htm) — 1 January 1995, [**China**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm) — 11 December 2001, [**Colombia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/colombia_e.htm) — 30 April 1995, [**Congo**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/congo_e.htm) — 27 March 1997, [**Costa Rica**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/costa_rica_e.htm) — 1 January 1995, [**Côte d’Ivoire**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cote_ivoire_e.htm) — 1 January 1995, [**Croatia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/croatia_e.htm) — 30 November 2000, [**Cuba**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cuba_e.htm) — 20 April 1995, [**Cyprus**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cyprus_e.htm) — 30 July 1995, [**Czech Republic**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/czech_republic_e.htm) — 1 January 1995, [**Democratic Republic of the Congo**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/democratic_republique_congo_e.htm) — 1 January 1997, [**Denmark**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/denmark_e.htm) — 1 January 1995, [**Djibouti**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/djibouti_e.htm) — 31 May 1995, [**Dominica**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/dominica_e.htm) — 1 January 1995, [**Dominican Republic**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/dominican_republic_e.htm) — 9 March 1995, [**Ecuador**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ecuador_e.htm) — 21 January 1996, [**Egypt**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/egypt_e.htm) — 30 June 1995, [**El Salvador**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/el_salvador_e.htm) — 7 May 1995, [**Estonia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/estonia_e.htm) — 13 November 1999, [**European Union (formerly EC)**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/european_communities_e.htm) — 1 January 1995, [**Fiji**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/fiji_e.htm) — 14 January 1996, [**Finland**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/finland_e.htm) — 1 January 1995, [**France**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/france_e.htm) — 1 January 1995, [**Gabon**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/gabon_e.htm) — 1 January 1995, [**Gambia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/the_gambia_e.htm) — 23 October 1996, [**Georgia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/georgia_e.htm) — 14 June 2000, [**Germany**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/germany_e.htm) — 1 January 1995, [**Ghana**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ghana_e.htm) — 1 January 1995, [**Greece**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/greece_e.htm) — 1 January 1995, [**Grenada**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/grenada_e.htm) — 22 February 1996, [**Guatemala**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/guatemala_e.htm) — 21 July 1995, [**Guinea**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/guinea_e.htm) — 25 October 1995, [**Guinea-Bissau**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/guinea_bissau_e.htm) — 31 May 1995, [**Guyana**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/guyana_e.htm) — 1 January 1995, [**Haiti**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/haiti_e.htm) — 30 January 1996, [**Honduras**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/honduras_e.htm) — 1 January 1995, [**Hong Kong, China**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/hong_kong_china_e.htm) — 1 January 1995, [**Hungary**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/hungary_e.htm) — 1 January 1995, [**Iceland**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/iceland_e.htm) — 1 January 1995, [**India**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/india_e.htm) — 1 January 1995, [**Indonesia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm) — 1 January 1995, [**Ireland**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ireland_e.htm) — 1 January 1995, [**Israel**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/israel_e.htm) — 21 April 1995, [**Italy**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/italy_e.htm) — 1 January 1995, [**Jamaica**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/jamaica_e.htm) — 9 March 1995, [**Japan**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/japan_e.htm) — 1 January 1995, [**Jordan**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/jordan_e.htm) — 11 April 2000, [**Kazakhstan**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/kazakhstan_e.htm) — 30 November 2015, [**Kenya**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/kenya_e.htm) — 1 January 1995, [**Korea, Republic of**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/korea_republic_e.htm) — 1 January 1995, [**Kuwait, the State of**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/kuwait_e.htm) — 1 January 1995, [**Kyrgyz Republic**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/kyrgyz_republic_e.htm) — 20 December 1998, [**Lao People’s Democratic Republic**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/lao_e.htm) — 2 February 2013, [**Latvia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/latvia_e.htm) — 10 February 1999, [**Lesotho**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/lesotho_e.htm) — 31 May 1995, [**Liberia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/liberia_e.htm) — 14 July 2016, [**Liechtenstein**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/liechtenstein_e.htm) — 1 September 1995[**Lithuania**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/lithuania_e.htm) — 31 May 2001, [**Luxembourg**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/luxembourg_e.htm) — 1 January 1995, [**Macao, China**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/macao_china_e.htm) — 1 January 1995, [**Madagascar**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/madagascar_e.htm) — 17 November 1995, [**Malawi**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/malawi_e.htm) — 31 May 1995, [**Malaysia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/malaysia_e.htm) — 1 January 1995, [**Maldives**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/maldives_e.htm) — 31 May 1995, [**Mali**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mali_e.htm) — 31 May 1995, [**Malta**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/malta_e.htm) — 1 January 1995, [**Mauritania**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mauritania_e.htm) — 31 May 1995, [**Mauritius**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mauritius_e.htm) — 1 January 1995, [**Mexico**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mexico_e.htm) — 1 January 1995, [**Moldova, Republic of**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/moldova_e.htm) — 26 July 2001, [**Mongolia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mongolia_e.htm) — 29 January 1997, [**Montenegro**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/montenegro_e.htm) — 29 April 2012, [**Morocco**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/morocco_e.htm) — 1 January 1995, [**Mozambique**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mozambique_e.htm) — 26 August 1995, [**Myanmar**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/myanmar_e.htm) — 1 January 1995, [**Oman**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/oman_e.htm) — 9 November 2000, [**Pakistan**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/pakistan_e.htm) — 1 January 1995, [**Panama**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/panama_e.htm) — 6 September 1997, [**Papua New Guinea**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/papua_new_guinea_e.htm) — 9 June 1996, [**Paraguay**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/paraguay_e.htm) — 1 January 1995, [**Peru**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/peru_e.htm) — 1 January 1995, [**Philippines**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/philippines_e.htm) — 1 January 1995, [**Poland**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/poland_e.htm) — 1 July 1995, [**Portugal**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/portugal_e.htm) — 1 January 1995, [**Qatar**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/qatar_e.htm) — 13 January 1996, [**Romania**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/romania_e.htm) — 1 January 1995, [**Russian Federation**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/russia_e.htm) — 22 August 2012, [**Rwanda**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/rwanda_e.htm) — 22 May 1996, [**Saint Kitts and Nevis**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/st_kitts_nevis_e.htm) — 21 February 1996, [**Saint Lucia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/saint_lucia_e.htm) — 1 January 1995, [**Saint Vincent and the Grenadines**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/saint_vincent_grenadines_e.htm) — 1 January 1995, [**Samoa**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/samoa_e.htm) — 10 May 2012, [**Saudi Arabia, Kingdom of**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/saudi_arabia_e.htm) — 11 December 2005, [**Senegal**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/senegal_e.htm) — 1 January 1995, [**Seychelles**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/seychelles_e.htm) — 26 April 2015, [**Sierra Leone**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/sierra_leone_e.htm) — 23 July 1995, [**Singapore**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/singapore_e.htm) — 1 January 1995, [**Slovak Republic**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/slovak_republic_e.htm) — 1 January 1995, [**Slovenia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/slovenia_e.htm) — 30 July 1995, [**Solomon Islands**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/solomon_islands_e.htm) — 26 July 1996, [**South Africa**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/south_africa_e.htm) — 1 January 1995, [**Spain**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/spain_e.htm) — 1 January 1995, [**Sri Lanka**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/sri_lanka_e.htm) — 1 January 1995, [**Suriname**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/suriname_e.htm) — 1 January 1995, [**Swaziland**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/swaziland_e.htm) — 1 January 1995, [**Sweden**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/sweden_e.htm) — 1 January 1995, [**Switzerland**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/switzerland_e.htm) — 1 July 1995, [**Chinese Taipei**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chinese_taipei_e.htm) — 1 January 2002, [**Tajikistan**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/tajikistan_e.htm) — 2 March 2013, [**Tanzania**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/tanzania_e.htm) — 1 January 1995, [**Thailand**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/thailand_e.htm) — 1 January 1995, [**The former Yugoslav Republic of Macedonia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/macedonia_e.htm) — 4 April 2003, [**Togo**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/togo_e.htm) — 31 May 1995, [**Tonga**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/tonga_e.htm) — 27 July 2007, [**Trinidad and Tobago**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/trinidad_tobago_e.htm) — 1 March 1995, [**Tunisia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/tunisia_e.htm) — 29 March 1995, [**Turkey**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/turkey_e.htm) — 26 March 1995, [**Uganda**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/uganda_e.htm) — 1 January 1995, [**Ukraine**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.htm) — 16 May 2008, [**United Arab Emirates**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/united_arab_emirates_e.htm) — 10 April 1996, [**United Kingdom**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/united_kingdom_e.htm) — 1 January 1995, [**United States**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/usa_e.htm) — 1 January 1995, [**Uruguay**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/uruguay_e.htm) — 1 January 1995, [**Vanuatu**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/vanuatu_e.htm) — 24 August 2012, [**Venezuela, Bolivarian Republic of**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/venezuela_e.htm) — 1 January 1995, [**Viet Nam**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/vietnam_e.htm) — 11 January 2007, [**Yemen**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/yemen_e.htm) — 26 June 2014, [**Zambia**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/zambia_e.htm) — 1 January 1995, [**Zimbabwe**](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/zimbabwe_e.htm) — 5 March 1995

1. **Struktur Organisasi[[29]](#footnote-30)**

Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, WTO dilengkapi dengan sejumlah organ yaitu :

*Ministerial Conference* (KTM), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.[[30]](#footnote-31) Terdiri dari wakil-wakil setingkat kabinet dari seluruh negara anggota WTO, dan mengadakan pertemuan secara reguler tiap dua tahun sekali dalam beberapa hari.[[31]](#footnote-32)Organ ini yang akan melaksanakan fungsi-fungsi WTO dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk fungsi tersebut.[[32]](#footnote-33)

1. *General Council* (Dewan Umum),organ yang melaksanakan kewenangan KTM sehari-hari yang anggotanya terdiri dari diplomat setingkat duta besar dari seluruh negara anggota WTO. Dewan umum biasanya bertemu sekali dalam dua bulan di Jenewa. Ketika Dewan Umum bersidang untuk melaksanakan tanggung jawab yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa, badan tersebut bersidang sebagai badan penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement),* dengan prosedurnya sendiri. Ketika dewan umum bersidang untuk melaksanakan tanggungjawabnya yang berhubungan dengan pengkajian kebijakan-kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO, badan tersebut bersidang sebagai badan kebijakan perdagangan (*Trade Policy Review Body),* yang juga memiliki peraturan prosedur sendiri.[[33]](#footnote-34)
2. *Council For Trade In Goods (*Dewan Perdagangan Barang) adalah dewan yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang.[[34]](#footnote-35)
3. *Council For Trade In Service (*Dewan Perdagangan Jasa) adalah dewan yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa.[[35]](#footnote-36)
4. *Council For Trade –Related Aspects of Intelectual Property Right (*Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dan hak atas kekayaan intelektual.[[36]](#footnote-37)

****

sumber: <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/organigram_e.pdf>

1. **Pembuatan Keputusan[[37]](#footnote-38)**

Praktek pembuatan keputusan yang dilaksanakan dalam GATT, pada pokoknya diterapkan pula dalam WTO.pemungutan suara konsensus tetap beraku manakala tidak ada suara keberatan dari anggota lainnya. Apabila ada yangberkeberatan ,maka cara yang ditempuh adalah melalui pemungutan suara. Keputusan-keputusan masih masih menggunakan suara mayoritas ‘satu negara satu suara’.

Persoalaan penafsiran mengenai aturan-aturan dari perjanjian WTO dan asalah ‘penanggalan (waiver) atas kewajiban-kewajiban suatu anggota, cara pemungutan suaranya berbeda. Untuk memutuskan masalah penafsiran Piagam WTO (dan Annex 1 Multilateral Trade Agreements) mensyaratkan harus adanya ¾ suara dari keseluruhan anggota WTO, terhadap masalah penanggalan kewajiban-kewajiban suatu negara anggota, maka keputsan harus diambil secara konsensus jika cara ini tidak tercapai, maka keputusannya diambil dengan ¾ suara dari keseluruhan anggota WTO.

1. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)

ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja samaantarnegara di Asia Tenggara sejak tahun1967, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967di Bangkok (Ibukota Thailand) oleh Indonesia, Malaysia,Filipina,Singapura,dan Thailand. Pendirian itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok dan diperingati setiap tahun sebagai hari ASEAN.[[38]](#footnote-39)

1. **Sejarah Terbentuknya Asean**

Pembentukan ASEAN sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Negara-negara Asia Tenggara terhadap ancaman eksternal dan internal di kawasan ini di tahun 1960-an. Ancaman eksternal ini terlihat sejak semakin kuatnya pengaruh komunisme di kawasan Asia umumnya sertafaktor perang Vietnam yang semakin memuncak. Ancaman internal adalah adanya pertikaian sesame Negara di kawasan ini, misalnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia.[[39]](#footnote-40)

Seungguhnyasebelum ASEAN terbentuk telah ada organisasi regional di kawasan the Association of South Asia (ASA) namun pengaruh dan manfaatnya kurang.Salah satu alasannya adalah karena tidak cukup banyaknya Negara yang tergabung dan terwakili dalam organisasi regional tersebut. Organisasi yang dimaksud adalah dibentuk tahun 1961 dengan anggota Malaysia,Thailand dan Filipina.[[40]](#footnote-41)

ASA dapat dipandang sebgai cikal bakal lahirnya ASEAN.[[41]](#footnote-42)Tujuan ASA adalah memajukan pertumbuhan ekonomi dan budaya melalui saling kerjasama dan bantu-membantu di antara negara-negara anggotanya.[[42]](#footnote-43)wadah lainnya adalah SEATO (the South-East Asia Treaty Organization) dengan anggotanya Filipina dan Thailand.

Pada tahun-tahun Pertama pembentukannya, ASEAN tidak begitu aktif.Tidak banyak kebijakan atau pengaturan bersama yang berhasil dikeluaarkan.ASEAN baru kelihatan kegiatannya pada bulan Februari 1976 ketika pertemuan tingkat tinggi para penguasa ASEAN berlangsung di Bali. Pertemuan Bali ini menghasilkan 3 kesepakatan penting, yakni [[43]](#footnote-44):

1. The Agreement of Establishment of The Permanent Secretariat of ASEAN;
2. The Declaration of ASEAn Concord; dan
3. The Traety of Amity and Cooperration in South-East Asia.

Ketiga kesepakatan ini beserta Deklarasi ASEAN tahun 1967 menjadi instrument penting ASEAN Berikut adalah uraian singkat mengenai keempat instrument ASEAN tersebut.

1. Deklarasi Bangkok 1967

Tujuan dan maksud ASEAN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan social dan budaya, memajukan perdamaian dan stabilitas regional, memajukan kerjasama aktif dan saling bantu membantu dibidang ekonomi, social, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi; pemberian bantuan di bidang pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, professional, teknik; kerjasama di bidang pertanian, industry, perdagangan, transportasi, komunikasi dan standar hidup; memajukan kajian mengenai Asia Tenggara; dan memajukan kerjasama dengan organisasi internasional dan regional lainnya yang memiliki maksud dan tujuan yang samadengan ASEAN.[[44]](#footnote-45)

Deklarasi Bangkok menetapkan pula mekanisme untuk melaksanakan tujuannya.Deklarasi menetapkan suatu pertemuan tahunan para menteri luar negeri (yang dikenal sebagai the ASEAN Ministerial Meeting).Deklarasi menetapkan suatu standing committee bertugas melaksanakan perkerjaan ASEAN diantara pertemuan tahunan the Ministerial Meeting.[[45]](#footnote-46)

Deklarasi juga mendirikan ad hoc committee dan permanent committee yang terdiri para spesialis dan pejabat mengenai subjek-subjek tertentu. Deklarasi juga mendirikan suatu secretariat Nasional ASEAN di setiap Negara anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan ASEAN atas nama Negara anggota yang bersangkutan dan untuk mempersiapkan dan melaksanakan setiap pertemuan tahunan atau pertemuan khusus ASEAN yang kebetulan dilaksanakan di Negara tersebut.[[46]](#footnote-47)

Berikut Tokoh-tokoh penandatanganan Deklarasi Bangkok :

a.**Adam Malik** (Menteri Luar Negeri Indonesia)

b.**TunAbdulRazak** (Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri

Malaysia)

c.**Narciso Ramos** (Menteri LuarNegeri Filipina)

d.**S. Rajaratnam** (Menteri Luar Negeri Singapura)

e.**ThanatKhoman** (Menteri Luar Negeri Thailand)



PenandatangananDeklarasi Bangkok

*Sumber:SekretariatASEAN*

1. *Treaty of Amity and Cooperation*

*Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) (perjanjian persahabatan dan kerjasama) ditandatangai di Bali pada tanggal 1976.Perjanjian menegaskan kembali aspirasi dan tujuan ASEAN, yakni perdamaian, persahabatan dan kerjasama.

Ketentuan penting yang dihasilkan dalam TAC adalah kesepakatan dari High Contracting Parties (Negara-negara anggota ASEAN) mengenai pengakuan terhadap prinsip fundamental kerjasama antar anggota ASEAN. Prinsip Fundamental tersebut adalah:[[47]](#footnote-48)

1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, prinsip persamaan, integritas wilayah dan identitas nasional semua Negara (anggota ASEAN);
2. Hak setiap Negara untuk mengurus bangsanya tanpa campur tangan, subversi atau tekanan;
3. Prinsip Non-interferensi didalam urusan dalam negeri anggota lainnya.
4. Penolakan atas setiap penggunaan atau ancaman kekerasan;
5. Penyelesaian sengketa secara damai.

Khusus untuk penyelesaian sengketa termuat dalam bab IV perjanjian TAC. Bab ini mendirikan suatu High Council (Dewan Agung) yang terdiri dari perwakilan para menteri dari setiap anggota ASEAN guna mengakui adanya sengketa antara negara anggota serta merekomendasikan cara penyelesaiannya.[[48]](#footnote-49)

1. *Declaration of ASEAN Concord*

*The Declaration of ASEAN Concord* (Deklarasi kesepakatan ASEAN) ditandatangani di Bali pada tanggal 24 februari 1976. Deklarasi ini memuat tentang ketentuan yang lebih detail mengenai tujuan–tujuan dalam Deklarasi ASEAN 1967. Deklarasi ini juga mengesahkan suatu program aksi sebagai kerjasama ASEAN.

Tujuan yang hendak dicapai antar lain mengharmonisasikan pandangan para Negara anggota. Apabila memungkinkan, Deklarasi juga mengupayakan suatu tindakan aksi bersama dalam menghadapi masalah-masalah di bidang politik.[[49]](#footnote-50)

1. *Agreement of Establishment of the permanent Secretariat*

*Agreement of Establishment of the permanent* Sekretariat (Perjanjian Pembentukan Sekretariat Tetap ASEAN) ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali.Perjanjian ini mendirikan suatu Sekretaris Jenderal ASEAN yang tugasnya mengkoordinasikan fungsi-fungsi sekretaris-jenderal nasional ASEAN (yang didirikan oleh Deklarasi ASEAN 1967).

Perjanjian ini juga menetapkan tiga biro dibawah Sekretariat Tetap, yakni dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan social budaya.[[50]](#footnote-51)Menindaklanjuti perjanjian ini, seorang Secretary General ditunjuk pada bulan juni 1976 dan secretariat ASEAN didirikan oleh perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1967.[[51]](#footnote-52)

1. Piagam ASEAN (ASEAN Charter) 2007

Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, akhirnya ASEAN memiliki landasan hukum yang kuat.Bulan November 2007, kesepuluh Negara ASEAN secara aklamasi menyetujuidan mengesahkan Piagam ASEAN (the ASEAN Charter). Berdasarkan Piagam, untuk berlaku Piagam harus diratifikasi oleh seluruh anggotanya. Singapura adalah Negara pertama yang meratifikasinya pada awal Januari.Piagam ASEAN memuatprinsip-prinsip yang tertuang dalam semuaperjanjian, deklarasi,dan kesepakatan ASEAN. PiagamASEANterdiri atas 1 mukadimah,13bab, dan 55 pasal.[[52]](#footnote-53)

1. Keanggotaan

ASEAN memiliki 10 negara anggota,yaitu:[[53]](#footnote-54)

1. Indonesia (sejak 8 Agustus 1967)
2. Malaysia (sejak 8 Agustus 1967)
3. Singapura (sejak 8 Agustus 1967)
4. Thailand (sejak 8 Agustus 1967)
5. Filipina (sejak 8Agustus 1967)
6. Brunei Darussalam(sejak 8 Januari 1984)
7. Vietnam (sejak28Juli1995)
8. Laos (sejak 23 Juli 1997)
9. Myanmar (sejak 23 Juli 1997)
10. Kamboja (sejak 30 April 1999)
11. Pemungutan Suara

Cara ASEAN dalam menempuh pemungutan suara agak berbeda.pada lembaga-lembaga atau organisasi internasional menggunakan cara, misalnya *weighted voting*, mayoritas sederhana, dan lain-lain, ASEAN menggunakan cara yang disebut dengan Musyawarah dan Mufakat.[[54]](#footnote-55)Hanya untuk mufakat kadang kala digunakan padanan kata bahasa inggrisnya yaitu *consensus.*Cara pemungutan suara inilah yang dikenal sebagai “ *ASEAN Way*”.[[55]](#footnote-56)

1. Pertemuan – Pertemuan dalam ASEAN[[56]](#footnote-57)
2. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintahan negara anggota.
3. Dewan KoordinasiASEAN(*ASEAN CoordinatingCouncil*), pertemuan para menteri luar negeri Negara anggota ASEAN, sebagai koordinator dewan komunitas ASEAN.
4. Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN CommunityCouncils*), yaitu pertemuan para menteri yang membidangi tiga pilar Komunitas ASEAN.
5. Pertemuan badan-badan sektoral tingkat Menteri (*ASEAN Sectoral Ministerial Bodies)*, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi masing-masing sektor kerja sama ASEAN.
6. Pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN (*ASEAN Senior Officials’Meeting*), yaitu pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri Negara anggota ASEAN yang membidangi masing-masing sector kerjasama ASEAN.
7. Tujuan ASEAN[[57]](#footnote-58)

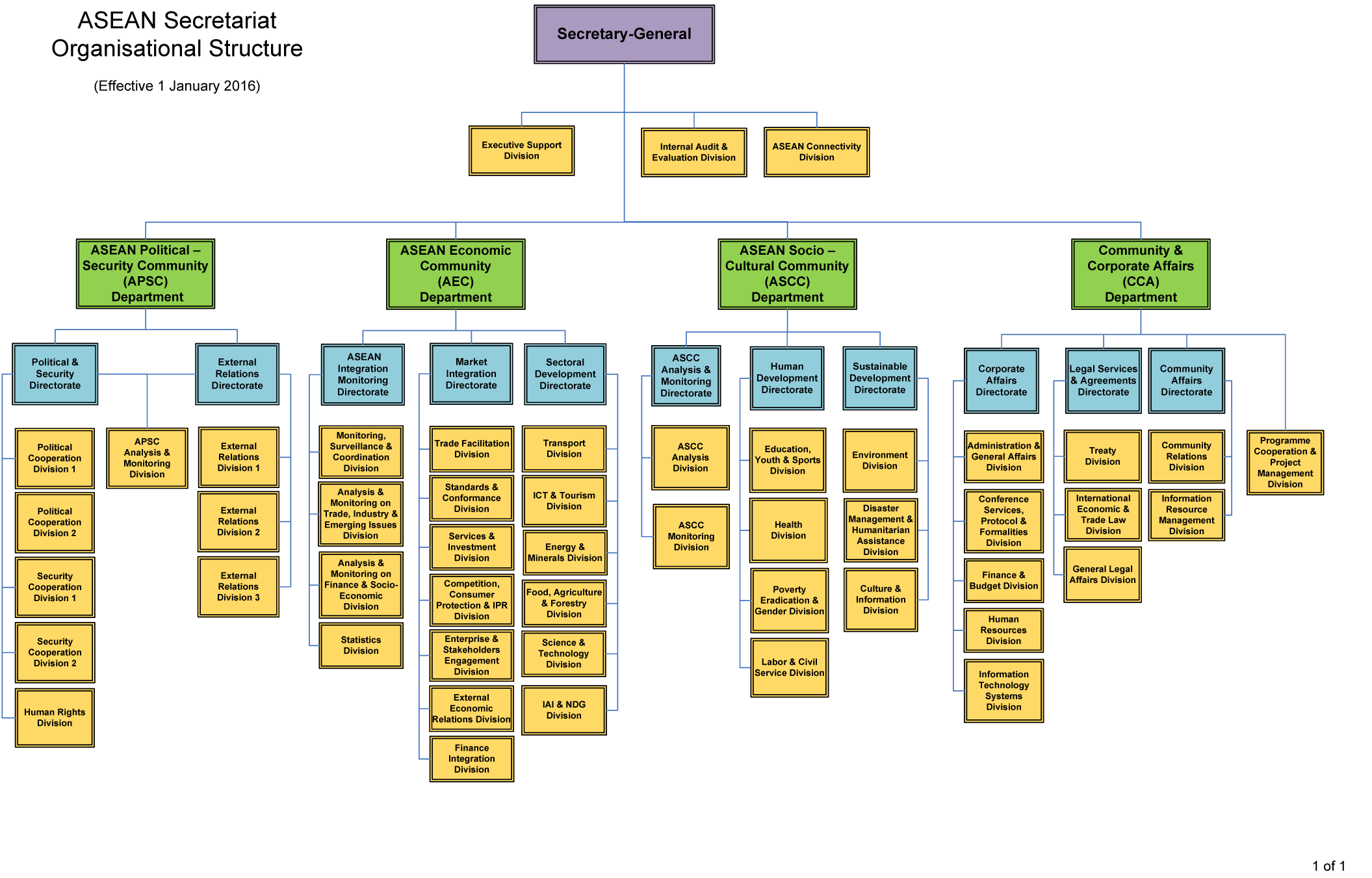
Tujuan ASEAN tertera dalam Piagam ASEAN bab 1 Tujuan dan Prinsip Pasal 1 yang berisi :

* 1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
  2. meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
  3. mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
  4. menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan dilingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;

e. menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif,dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang didalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha,pekerja profesional,pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;

1. mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan diASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal balik;

**Stuktur organisasi**



1. UNCTAD
2. Sejarah UNCTAD[[58]](#footnote-59)

Pada awal 1960-an, kekhawatiran yang berkembang mengenai tempat negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional membuat banyak dari negara-negara ini menyerukan diadakannya konferensi penuh yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi masalah ini dan mengidentifikasi tindakan internasional yang sesuai.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pertama diadakan di Jenewa pada tahun 1964.   
Mengingat besarnya masalah yang dipertaruhkan dan kebutuhan untuk mengatasinya, konferensi tersebut dilembagakan untuk bertemu setiap empat tahun, dengan pertemuan antar lembaga pemerintah antara sesi dan sekretariat permanen yang memberikan dukungan substantif dan logistik yang diperlukan. Bersamaan, negara-negara berkembang membentuk [Kelompok 77](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.g77.org/&usg=ALkJrhgWznem8iakZtiM3IDbkv4ZK1bmQA) untuk menyuarakan keprihatinan mereka. (Hari ini, G77 memiliki 131 anggota.)

Ekonom terkemuka Argentina [Raúl Prebisch](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=http://unctad.org/en/Pages/About%2520UNCTAD/OSG/DrRaulPrebisch.aspx&usg=ALkJrhhCg9-llPKAYI4yZ0jXtKJsf_xzkw), yang memimpin Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin dan Karibia, menjadi Sekretaris Jenderal pertama organisasi tersebut.

Tahap 1 (1960-1970)

Dalam beberapa dasawarsa awal operasinya, UNCTAD mulai berwibawa:

* + - sebagai forum antar pemerintah untuk dialog dan negosiasi Utara-Selatan mengenai isu-isu yang diminati negara-negara berkembang, termasuk perdebatan mengenai "New International Economic Order".
    - untuk penelitian analitis dan saran kebijakan mengenai isu-isu pembangunan.
    - Kesepakatan yang diluncurkan oleh UNCTAD selama ini meliputi:
    - Generalised System of Preferences (1968), dimana negara maju memberikan akses pasar yang lebih baik terhadap ekspor dari negara-negara berkembang.
    - sejumlah International Commodities Agreements, yang bertujuan untuk menstabilkan harga produk ekspor yang penting bagi negara-negara berkembang.
    - Konvensi tentang Kode Etik untuk Konferensi Liner, yang memperkuat kemampuan negara-negara berkembang untuk memelihara armada pedagang nasional.
    - adopsi seperangkat prinsip dan peraturan yang disepakati secara multilateral atas Penguasaan Praktik Bisnis yang Membatasi. Karya ini kemudian berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai "Kebijakan Perdagangan dan Persaingan".

Selanjutnya, UNCTAD adalah kontributor utama untuk:

1. definisi target 0,7% produk domestik bruto (PDB) diberikan sebagai bantuan pembangunan resmi oleh negara maju ke negara-negara miskin, seperti yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1970.
2. identifikasi Kelompok Least Developed Countries (LDCs) pada awal 1971, yang menarik perhatian pada kebutuhan khusus negara-negara paling miskin ini. UNCTAD menjadi focal point dalam sistem PBB untuk menangani isu-isu pembangunan ekonomi LDC.

Tahap 2 (1980-an)

Pada 1980-an, UNCTAD dihadapkan pada lingkungan ekonomi dan politik yang berubah:

1. Ada transformasi signifikan dalam pemikiran ekonomi. Strategi pembangunan menjadi lebih berorientasi pasar, dengan fokus pada liberalisasi perdagangan dan privatisasi perusahaan negara.
2. Sejumlah negara berkembang terjerumus ke dalam krisis utang yang parah. Meskipun program penyesuaian struktural oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, sebagian besar negara berkembang yang terkena dampak tidak dapat pulih dengan cepat. Dalam banyak kasus, mereka mengalami pertumbuhan negatif dan tingkat inflasi yang tinggi. Untuk alasan ini, tahun 1980an dikenal sebagai "dekade yang hilang", terutama di Amerika Latin.
3. Interdependensi ekonomi di dunia meningkat pesat.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut, UNCTAD melipatgandakan usaha yang ditujukan untuk:

1. memperkuat isi analitis perdebatan antar pemerintah, terutama mengenai pengelolaan makroekonomi dan masalah keuangan dan moneter internasional.
2. memperluas ruang lingkup kegiatannya untuk membantu negara-negara berkembang dalam usaha mereka untuk mengintegrasikan ke dalam sistem perdagangan dunia. Dalam hal ini,
3. bantuan teknis yang diberikan oleh UNCTAD ke negara-negara berkembang sangat penting dalam perundingan perdagangan Uruguay, yang dimulai dengan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) pada tahun 1986. UNCTAD memainkan peran kunci dalam mendukung perundingan untuk Persetujuan Umum pada Trade in Services (GATS).
4. Pekerjaan UNCTAD tentang efisiensi perdagangan (fasilitasi pabean, transportasi multimodal) memberikan kontribusi penting bagi memungkinkan negara-negara berkembang memperoleh keuntungan lebih besar dari perdagangan.
5. UNCTAD membantu negara-negara berkembang dalam penjadwalan ulang hutang resmi dalam perundingan di Paris Club.
6. mempromosikan kerjasama South-South. Pada tahun 1989, Persetujuan tentang Sistem Perdagangan Preferensi Global antar Negara Berkembang (GSTP) mulai berlaku. Ini memberikan pemberian tarif serta preferensi non-tarif di antara para anggotanya. Sampai saat ini, kesepakatan tersebut telah diratifikasi oleh 44 negara.
7. menangani keprihatinan negara-negara yang paling miskin dengan menyelenggarakan Konferensi PBB pertama di Negara-negara Terkemuka di Dunia pada tahun 1981. Sejak saat itu, dua konferensi internasional lainnya diadakan pada interval waktu 10 tahun.

Tahap 3 (dari 1990-an sampai sekarang)

Perkembangan utama dalam konteks internasional:

1. Kesimpulan dari perundingan perdagangan Putaran Uruguay di bawah GATT menghasilkan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) pada tahun 1995, yang menyebabkan penguatan kerangka hukum yang mengatur perdagangan internasional.
2. Peningkatan arus keuangan internasional yang spektakuler menyebabkan meningkatnya ketidakstabilan keuangan dan ketidakstabilan.
3. Dengan latar belakang ini, analisis UNCTAD memberi peringatan dini mengenai risiko dan dampak destruktif dari krisis keuangan terhadap pembangunan. Akibatnya, UNCTAD menekankan perlunya "arsitektur keuangan internasional" yang berorientasi pada pembangunan.
4. Arus investasi langsung asing menjadi komponen utama globalisasi.
5. UNCTAD menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang berbeda terhadap masalah negara-negara berkembang. Konferensi kesepuluh yang diadakan di Bangkok pada bulan Februari 2000, mengadopsi sebuah deklarasi politik - "The Spirit of Bangkok" - sebagai strategi untuk menangani agenda pembangunan di dunia yang mengglobal.

Dalam beberapa tahun terakhir, UNCTAD :

1. selanjutnya memfokuskan penelitian analitik tentang keterkaitan antara perdagangan, investasi, teknologi dan pengembangan usaha.
2. mengajukan "agenda positif" bagi negara-negara berkembang dalam negosiasi perdagangan internasional, yang dirancang untuk membantu negara-negara berkembang dalam memahami kompleksitas negosiasi perdagangan multilateral dengan lebih baik dan dalam merumuskan posisinya.
3. Memperluas pekerjaan mengenai masalah investasi internasional, menyusul penggabungan ke UNCTAD dari Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perusahaan Transnasional yang berpusat di New York pada tahun 1993.
4. memperluas dan mendiversifikasi bantuan teknisnya, yang saat ini mencakup berbagai bidang, termasuk juru runding perdagangan pelatihan dan menangani isu-isu terkait perdagangan; manajemen hutang, tinjauan kebijakan investasi dan promosi kewiraswastaan; komoditas; hukum dan kebijakan persaingan; dan perdagangan dan lingkungan.
5. Tujuan UNCTAD

Tujuan Utama UNCTAD adalah memajukan perdagangan internasional, khususnya Negara-negara sedang berkembang dengan maksud untuk peningkatan pembangunan ekonominya.[[59]](#footnote-60)

UNCTAD mendukung negara-negara berkembang untuk mengakses manfaat ekonomi global secara lebih adil dan efektif. serta membantu membekali mereka untuk mengatasi potensi kekurangan integrasi ekonomi yang lebih besar. Untuk melakukan ini, UNCTAD menyediakan analisis, pengembangan konsensus, dan bantuan teknis. Ini membantu mereka untuk menggunakan perdagangan, investasi, keuangan, dan teknologi sebagai kendaraan untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bekerja di tingkat nasional, regional, dan global, usaha kami membantu negara-negara untuk[[60]](#footnote-61):

1. Memahami pilihan untuk mengatasi tantangan pembangunan tingkat makro
2. Mencapai integrasi yang menguntungkan ke dalam sistem perdagangan internasional
3. Diversifikasi ekonomi membuat mereka kurang bergantung pada komoditas
4. Batasi eksposur terhadap volatilitas keuangan dan hutang
5. Menarik investasi dan membuatnya lebih berkembang ramah
6. Meningkatkan akses ke teknologi digital
7. Promosikan kewiraswastaan ​​dan inovasi
8. Bantu perusahaan lokal memindahkan rantai nilai
9. Mempercepat arus barang lintas batas
10. Lindungi konsumen dari penyalahgunaan
11. Curb peraturan yang menghambat kompetisi
12. Beradaptasi terhadap perubahan iklim dan penggunaan sumber daya alam secara lebih efektif

Bersama dengan departemen dan badan PBB lainnya, kami mengukur kemajuan oleh Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Agenda 2030.UNCTAD juga mendukung pelaksanaan [Pembiayaan untuk Pembangunan](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://www.un.org/esa/ffd/&usg=ALkJrhi3KUM_O5ETr-MDSIdGAu2s7QuRug) , sebagaimana diamanatkan oleh masyarakat global dalam Agenda Addis Ababa 2015, bersama dengan empat pemangku kepentingan institusional utama lainnya: Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa .

Meskipun UNCTAD bekerja terutama dengan pemerintah, untuk secara efektif menangani besarnya dan kompleksitas dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kami percaya bahwa kemitraan dan kerjasama yang lebih erat dengan sektor swasta dan masyarakat sipil sangat penting.

Pada akhirnya, UNCTAD melayani warga dari [194 negara](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://unctad.org/en/Pages/About%2520UNCTAD/UNCTADs-Membership.aspx&usg=ALkJrhhTHggqrZIPb_m_dFEOoYVSltmXlQ) yang membentuk organisasi kita. Tujuan kami adalah kemakmuran bagi semua.

1. **Keanggotaan**

Negara-negara yang dapat menjadi anggota badan ini adalah Negara-negara anggota PBB, atau anggota bdan-badan khusus PBB, atau anggota *the International Atomic Energy Agency*.[[61]](#footnote-62) Saat ini, UNCTAD memiliki 194 Negara Anggota[[62]](#footnote-63)

1. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi UNCTAD terdiri dari 2 (dua) badan kelengkapan utama, yaitu the trade and development Board dan Sekretariat.Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral yang dipilih oleh sekjen PBB dan disahkan oleh Majelis Umum.[[63]](#footnote-64)

*The Trade and Development Board (The Board)* melaksanakan fungsi-fungsi yang berda dibawah kewenangan UNCTAD, *the Board* berfungsi pula sebagai suatu panitia persiapan bagi siding-sidang UNCTAD berikutnya.Sidang-sidang UNCTAD dilaksanakn setiap4 tahun sekali.[[64]](#footnote-65)

Keanggotan dalam the Board terbatas pada Negara-negara anggota UNCTAD yang dipilih oleh UNCTAD dengan memperhatikan Pembagian Geografis dan perwakilan-perwakilan dari Negara-negara pelaku perdagangan utama (Resolusi 1995 (XIX) para.5).[[65]](#footnote-66)

The Board biasanya bersidang dua kali dalam setahun, pertemuan-pertemuan khusus dapat dilakukan manakala dipandang perlu.[[66]](#footnote-67) The board dalam melaksanakan fungsinya telah membentuk 7 komisi fungsional antarpemerintah,yaitu[[67]](#footnote-68) :

1. *Committee on commodities;*
2. *Committee on Manufacturers;*
3. *Committee on Invisibles and financing related to trade;*
4. *Committee on Shipping;*
5. *Committee on Transfer of Technology;*
6. *Committee on economic cooperation Among developing Countries; dan*
7. *Committee on Preferences.*

Setiap Negara anggota UNCTAD memiliki satu suara.Untuk masalh-masalah penting, keputusan diambil berdasarkan dua per-tiga dari keseluruhan suara.untuk masalah-masalah procedural, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas.[[68]](#footnote-69)

1. **Tentang Organisasi[[69]](#footnote-70)**

Pekerjaan substantif dilakukan oleh lima divisi, di bawah pimpinan [Sekretaris Jenderal](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://unctad.org/en/Pages/About%2520UNCTAD/OSG/OSG.aspx&usg=ALkJrhj8dNgdK5xsUBqO9Tr4LyL-iFzULQ):

1. [Divisi untuk Afrika, negara-negara terbelakang dan program khusus](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://unctad.org/en/pages/ALDC/ALDC.aspx&usg=ALkJrhjQYwaS3izKzEDUX549bcXxtmJPHA)
2. [Divisi strategi globalisasi dan pembangunan](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://unctad.org/en/pages/GDS/GDS.aspx&usg=ALkJrhgYR3Wm21M49YYZN_g9dcsLxnJ5Rw)
3. [Divisi investasi dan perusahaan](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://unctad.org/en/pages/DIAE/DIAE.aspx&usg=ALkJrhiqgC2jQERyvQaZP3svozZNGjSOjw)
4. [Divisi perdagangan barang dan jasa internasional, dan komoditas](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://unctad.org/en/pages/DITC/DITC.aspx&usg=ALkJrhihAh7S0PYBZjdonxmdQEdQQ37UKg)
5. [Divisi teknologi dan logistik](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://unctad.org/en/Pages/DTL/Technology,-Innovation-and-Trade-Logistics.aspx&usg=ALkJrhhLuKtTduUqcCX-614VekV5uU6pMg)

Selain itu, UNCTAD memiliki sejumlah layanan yang mendukung divisi ini untuk mencapai tujuan mereka:

1. Bagian komunikasi, informasi dan penjangkauan mengkomunikasikan pekerjaan kita secara online dan melalui media, juga membangun hubungan dengan [organisasi masyarakat sipil](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=http://unctad.org/en/Pages/About%2520UNCTAD/UNCTAD%2520And%2520Civil%2520Society/UNCTAD-And-Civil-Society.aspx&usg=ALkJrhh35Q7mdJ7uLt0VA2bOWMJL2dcyWQ) .
2. Layanan dukungan antar pemerintah memastikan bahwa pertemuan dan negosiasi berjalan dengan lancar.
3. Layanan kerjasama teknis mengelola database proyek kami, memberikan koordinasi atas kegiatan kerjasama teknis kami.
4. Layanan pengelolaan sumber daya mengelola anggaran, keuangan, teknologi informasi, dan kebutuhan sumber daya manusia.

Berkantor pusat di Jenewa, Swiss, UNCTAD juga memiliki kantorcabang di New York, Amerika Serikat, dan Addis Ababa, Ethiopia.

1. Individu

Keputusan Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*) Dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api Danzig (Danzig Railway Official’s Case), yang menyatakan “ apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu pada orang perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional.[[70]](#footnote-71)

Charles Cheny Hyde, seperti Yang dikutip oleh J.G Starke, Sebagai berikut:[[71]](#footnote-72)

*“ Internasional Law May be defined as that body of law which is composed for its greater part of principles and rules of conduct which state feel themselves bound to observe in their relations with each other, and which includes also :*

1. *The rules of law relating to the functioning of international institutions of organizations, their relations with each other, and their relations with state and individuals; and*
2. *Certain rules of law relating to individuals and non-states entities so far as the rights or duties os such individuals and non-states entities are the concern of the international community*”.

Jika diterjemahkan kurang lebih sebagai berikut :

“ Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah lakudimana Negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan oleh karena itu, juga harus menghormati dalam hubungan antara mereka satu dengan lainnya, dan juga yang mencakup :

1. Peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau organisasi internasional; hubungan antara organisasi internasional itu satu dengan yang lainnya; hubungan antara organisasi internasional itu dangan Negara atau Negara-negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.
2. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan Negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek-subyek hukum bukan Negara itu bersangkut-paut dengan masalah masyarakat internasional”.

Pada awalnya individu hanya diakui sebagai subjek hukum nasional, kemudian individu diakui sebagai subjek hukum internasional jika telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Negara, karena subjek hukum internasional adalah Negara.[[72]](#footnote-73) Namun sekarang, dalam batas-batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional[[73]](#footnote-74). Demikian pula individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional.[[74]](#footnote-75)

Menurut Hans Kelsen, yang dimaksud dengan individu adalah pengemban hak dan kewajiban (*a brearer of the rights and duties*).[[75]](#footnote-76)Individu dari konsepnya kebagi dalam dua bentuk, ysitu individu dalam arti fosok dan serangkaian pribadi hukum.Pengertian pertama adalah individu dalam arti orang perorangan.Physical atau natural person ini dapat disebut sebagai suatu ‘ Pribadi hukum’[[76]](#footnote-77).

Individu dapat dianggap sebagai subyek hukum ekonomi internsional dalam arti yang terbatas kedudukannya sebagai subyek hukum ekonomi internasional.Statusnya bergantung pada isi ketentuan perjanjian yang memberikan kedudukannya.Berdasarkan hukum internasional klasik, individu mendapatakan kedudukan dari aturan penting hukum kebiasaan internasional, misalnya aturan atau ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing.[[77]](#footnote-78)Dalam perkembangannya, pengertian individu sebagai subyek tidak terbatas dalam arti orang perorangan.Ia dapat berarti pula sebagai badan hukum (*juridicial person*) yang memiliki personalitas baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional.[[78]](#footnote-79)

Kedudukan Individu sebagai subyek hukum ekonomi internasional diatur, antara lain, dalam konvensi ICSID (*Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of of other states*) tahun 1965. Konvensi ini secara implicit mengakui individu sebagai suatu subyek hukum ekonomi internasional.[[79]](#footnote-80)

1. **Multinational Korporation[[80]](#footnote-81)**

Secara tradisional hukum internasional tradisional, perusahaan multinasional memiliki hak tapi tidak memiliki kewajiban.Oleh karena itu, dalam praktiknya, perusahaan multinasional hanya tunduk pada hukum domestik dari negara tempat mereka beroperasi.Secara historis hanya negara yang menjadi subyek hukum internasional, namun pada perkembangannya, saat ini NGO (*non government organizations*) dan MNC dianggap sebagai subjek hukum internasional layaknya individu.[[81]](#footnote-82)Hal ini muncul disebakan oleh perkembangan masyarakat internasasional, dimana negara menciptakan alat baru dan menciptakan kerjasama public-privat baik dengan NGO maupun dengan MNC.[[82]](#footnote-83)

Meskipun telah terjadi perkembangan dalam hukum internasional berupa pengakuan terhadap *non-state actor* sebagai subyek hukum internasional, tetapi perkembangan ini belum menempatkan MNC sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hokum internasional. Dengan demikian sampai saat ini MNC masih berstatus sebagai**obyekhukuminternasional,** dan pembebanan kewajiban kepadanya tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan melaluikewenangan negara. Negara-negara (utamanya negara berkembang) justru berlomba untuk semakin meringankan hokum nasionalnya bila terkait dengan investasi asing. Dengan demikian ketergantungan kepada hokum nasional kurang dapat diandalkan untuk mengurangi, mencegah dan menghukum perilaku negative dari MNC berupa pelanggaran hak asasi manusia, perusakan lingkungan,pengabaian hak konsumen dan persaingan usaha yang tidaksehat[[83]](#footnote-84).

MNC pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki standing untuk berperkara di *International Court of Justice*, namun dalam hal- hal tertentu MNC dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu Negara.[[84]](#footnote-85)

Perusahaan multinasional adalah perusahaan terkoordinasi terpusat yang didirikan di lebih dari satu negara-bangsa.Perusahaan multinasional yang khas terdiri dari perusahaan induk di satu negara bagian dengan anak perusahaan di satu atau lebih negara bagian lainnya.Namun, tidak ada istilah yang seragam.Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menggunakan istilah "korporasi transnasional", walaupun banyak penulis akademis telah menjatuhkan istilah itu karena hubungannya dengan Tata Ekonomi Internasional Baru yang sekarang didiskreditkan. Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization* / ILO) dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menggunakan istilah "perusahaan multinasional." Kesulitan utama perusahaan multinasional adalah pertanggungjawaban atau kesenjangan tata kelola yang disebabkan oleh tidak adanya peraturan perusahaan dalam hukum internasional.

Perusahaan transnasional sebagai subyek hukum ekonomi internasional sebenarnya dapat pula digolongkan ke dalam individu dengan arti *juridicial person*.*Juridicial person* lainnya adalah badan hukum atau perusahaan.

Yang dimaksud dengan perusahaan menurut Hans Kelsen adalah “*a group of individuals treated by law as a unity, namely as a person having rights and duties distinct from those of individuals composing it”.* Dalam batasan tersebut dapat kita lihat bahwa perusahaan adalah kumpulan individu berdasarkan hukum dianggap sebagai suatu kesatuan, yaitu sebagai pribadi yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban dari individu yang menjadi bagian dari kesatuan tersebut.

MNC memiliki personalitas yang lebih tinggi tingkatnya dari sekedar individu.Karena itu perlakuan (hukum) terhadapnya perlu pula dibedakan dalam mengkaji subyek hukum ekonomi internasional ini.*multinasional Corporation* sendiri sebenarnya merupakan suatu pengertian yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Ilmu hukum tidak sama sekali mengenal pengertian tersebut. Karena itu pula dalam membahas masalah ini dari sudut hukum, upaya terhadapnya menjadi controversial dan bahkan sulit.

Menurut Francois Rigaux, meskipun dalam kenyataannya MNC ini memiliki kemampuan untuk berunding dengan Negara-negara, namun adanya factor kemampuan tersebut tetap tidak memberi status sebagai subyek hukum internasional. Beliau mengatakan: ‘*The power of these groups and their capacity to negotiate with states-often from a position of strength cannot give them the statusof subjects of international law*

Mengenai penyelesaian suatu sengketa antara Negara dengan suatu perusahaan transnasional , juga masih ada silang pendapat. Pada umumnya, Negara Negara Amerika Latin dan Negara sedang berkembang serta Negara-negara sosialis berpendapat bahwa sengketa demikian hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan nasionaldilain pihak negara maju berpendapat bahwa forum yang berkompeten menyelesaikan sengketa demikian adalah pengadilan internasional, misalnya badan arbitrase internasional *ad hoc* ,atau forum penyelesaian yang dibentuk oleh badan arbitrase dan konsiliasi ICSID.

**BAB 3**

**Sumber Hukum dalam Hukum Ekonomi Internasional**

1. **Pengantar**

Prinsip Dasar dari hukum ekonomi internasional pada dasarnya adalah sama dengan prinsip-prinsip tradisional yang dikenal dalam hukum internasional; seperti, *Pacta Sunt Servanda*, Kemerdekaan, persamaan kedaulatan, asas timbal balik, kedaulatan ekonomi dan lain sebagainya.

Sumber hukum yang ada dalam hukum internasional, terutama yang tertuang dalam Pasal 38 (I) Statuta Mahkamah Internasional yaitu, Perjanjian internasional, Prinsip Hukum Umum dan doktrin/yurisprudensi.

1. **Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional (Pasal 2 Konvensi Wina 1969).Bentuk perjanjian ini dapat berbentuk bilateral, regional maupun multilateral.

Perjanjian internasional merupakan sumber hukum hukum ekonomi internasional terdiri atas perjanjian dibidang hukum ekonomi internasional dan putusan-putusan politik yang disepakati oleh negara-negara.Putusan politik yang terkait dengan hukum ekonomi internasional, serta sebagai tambahan sumber hukum perjanjian berupa piagam dan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh organisasi ekonomi internasional.

Masyarakat internasional membentuk perjanjian internasional dengan tujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban dalam hubungan ekonomi internasional.

Perjanjian Perdagangan Dunia (WTO), Perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean, perjanjian pembentukan sayarakat ekonomi eropa,perjanjian pembentukan Organization Petrolium Exporting Countries (APEC) dan lain sebagainya merupakan contoh-contoh perjanjian internasional yang dibuat dan mengikat negara-negara anggotanya.

1. **Hukum Kebiasaan Interrnasional**

Hukum kebiasaan internationaladalah sumber hukum yang berasal dari tindakan atau praktek yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, John O’Brien dalam bukunya menyatakaan bahwa, suatu ketentuan dapat dikatakan sebagai sumber hukum kebiasan internasional, jika ia memiliki syarat-syarat[[85]](#footnote-86);

1. *Time* : Dilakukan berulang-ulang dan dalam waktu yang lama
2. *Uniformity* : tindakan-tidakan yang dilakukan oleh negara-negara pada prakteknya tidak jauh berbeda antara satu negara dengan negara lainnya
3. *Consistency*: terhadap kasus yang sama, mendapat perlakukan yang sama
4. *Generality* : dijalakan secara meluas dan umum diantara mayoritas negara-negara

Sumber hukum kebiasaan internasional memiliki tempat yang penting dalam hukum ekonomi internasional.Namun pada umumnya sedikit saja aturan-aturan yang lahir dari (hukum) kebiasaan internasional yang berkaitan dengan transaksi ekonomi.[[86]](#footnote-87) Contoh aturan hukum yang bersumber dari kebiasaan ini adalah; prinsip non diskriminasi (nasional treatment dan most fovor nations), fair and equitable Treatment, exhaustion of local remedies, denial of justice, ship-wreck (pembajakan dan pengalihan lebih lanjut hak kapal yang tengelam) dan lain sebagainya.[[87]](#footnote-88)

1. **Prinsip Hukum Umum**

Bagian ke tiga dari sumber hukum hukum internasional adalah prinsip hukum umum, prinsip hukum umum ini adalah prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara.[[88]](#footnote-89)

Prinsip-prinsip hukum umum yang dikenal dalam hukum internasional publik dapat ditetapkan terhadap hukum ekonomi internasional public dapat diterapkan terhadap hukum ekonomi internasional.[[89]](#footnote-90) Contoh prinsip hukum umum dalam hukum internasional publik yang penting pula bagi hukum internasional, misalnya saja prinsip good faith, prinsip tanggung jawab negara, yaitu manakala suatu negara melakukan tindakan yang merugikan negara lain, maka negara itu bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat perbuatannya.[[90]](#footnote-91)

1. **Yurisprudensi/Doctrin**

Keputusan hakim terdahulu (yurisprudensi) bertindak sebagai sumber hukum, dijelaskan pada pasal 59 statuta Mahkamah Internasional yang berisi “---“

…*ex aequo et bono*yaitu putusan yang bukan atas pelaksanaaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran,

sejarah juga telah memberikan bukti bahwa putusan pengadilan dapat menjadi… sebagai contoh putusan-putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah internasional, banyak putusan yang dikeluarkan memperkenalkan ketentuan baru bagi hukum internasional, sebagai contoh putusam mahkamah tentang kasus

Pada lapangan hukum ekonomi internasional tidak menganut asas jurisprudensi sebagaimana halnya yang dikenal dalam system hukum *Common law.[[91]](#footnote-92)*Artinya putusan hakim yang dikeluarkan sebelumnya hanya berlaku untuk sengketa yang bersangkutan saja.[[92]](#footnote-93)Ia tidak mengikat sengketa yang kemudian lahir.[[93]](#footnote-94)Putusan-putusan hakim sebelumnya hanya memiliki kekuatan “pengaruh” saja bagi hakim dalam menangani sengketa yang dihadapinya.🡪cek putusan2 wto apakah ada putusan panel yang dipakai sebagai rujukan oleh panel yang kemudian

Ajaran atau doktrin dari sarjana terkemuka masih mengenai hukum ekonomi internasional perannya masih sangat kecil.Bahkan belum ada keseragaman dibandingkan dengan ajaran-ajaran dalam bidang hukum internasional klasik.[[94]](#footnote-95)Hal ini terutama disebabkan karena sulitnya bagi para sarjana untuk melepaskan dirinya dari kepentingan ekonomi negaranya yang menghasilkan doktrin doktrin sebagai sumber hukum tambahan.[[95]](#footnote-96)

1. **Resolusi**

*a determination of policy of a corporation by the vote of its board of directors. Legislative bodies also pass resolutions, but they are often statements of policy, belief or appreciation, and not always enactment of statutes or ordinances.*

Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.

Pengertian Resolusi adalah Seiring perkembangan kedinamisan hukum internasional melahirkan suatu tatanan sumber hukum baru yaitu resolusi atau keputusan suatu organisasi internasional yang menurut kebiasaan internasional diakui oleh negara-negara di dunia saat ini. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif suatu organisasi internasional[[96]](#footnote-97)

Resolution “ *a formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution*.[[97]](#footnote-98) Resolusi merupakan suatu pernyataan tercatat yang berisi kesepakatan oleh negara-negara anggota.[[98]](#footnote-99)

1. **Keputusan-keputusan**

Keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi-organisasi internasional, dalam lapangan hukum ekonomi internasional seperti organisasi-organisasi perdagangan, sebagai contoh WTO, ASEAN melalui MEA dan Masyarakat Ekonomi Eropa.

1. ***Code of Conduct***

Pedoman tertulis tentang standar etika yang diberikan oleh badan resmi atau asosiasi

profesional kepada anggotanya untuk membantu mereka mematuhi standar ini.

**BAB 4**

**Sistem Perdagangan Internasional melalui Mekanisme WTO**

1. **Gambaran Umum WTO**

Pada waktu berlangsungnya PD II, Negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris memprakarsai pembentukan organisasi ekonomi internasional untuk mengisi kebijakan-kebijakan ekonomi internasional. Tujuan pertama dari prakarsa tersebut mengeluarkan kebijakan *The Reciprocal Trade Agreement* yakni undang-undang yang mensyaratkan kewajiban resiprositas (timbal balik) untuk pengurangan-pengurangan tarif dalam perdagangan. *The Reciprocal Trade Agreement act* memberikan kebijakan kepada Presiden untuk melakukan negosiasi penurunan tarif. Tujuan kedua memberikan kerangka hukum untuk mencegah konflik seperti pada saat peristiwa PD I dan PD II.

Pada saat PD II seluruh negara menggunakansistem ekonomi proteksionistis sehingga mengakibatkan terhambatnya hubunganekonomi internasional. Terhambatnya hubungan ekonomi internasionalmenyebabkan dampak kemorosotan dan resesi ekonomi di dunia. Upaya untukmenata hubungan ekonomi internasional menjelang PD II berakhir dilakukanmelalui diselenggarakan konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, AmerikaSerikat menghasilkan beberapa lembaga yakni the International Bank*Recontruction and Development (IBRD)* dan *the International Monetary Found (IMF)*. Konferensi ini, meskipun ditujukan khususnya untuk persoalan-persoalan moneter, menyadari perlunya insiatif-inisiatif pengaturan mengenai perdagangan barang-barang.Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan *the International Trade Organization (ITO)*.

Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan, salah satu program kerja yang dilakukan adalah menyelenggarakan konferensi-konferensi pada tahun 1946 dan 1947. Konferensi ini diselenggarakan bertujuan untuk merancang suatu Piagam Organisasi Perdagangan Internasional ITO. Piagam ini berhasil disahkan pada tahun 1948 di Havana. Maka Piagam ini dinamakan Piagam Havana yang memerlukan ratifikasi dari negara sebagai pelaku utama ekonomi dunia.Sementara Piagam Havana belum berlaku, guna mengisi kekosongan hukum perdagangan internasional, negara-negara merundingkan aturan-aturan perdagangan internasional yang kemudian diwadahi oleh *the General Agrement On Tariffs And Trade (GATT)* 1947 sebagai *Umbrella of Law.* Pada pertemuan-pertemuan itu telah dirundingkan pembentukan GATT.

Pada mulanya GATT 1947 merupakan suatu persetujuan multilateral yang mensyaratkan pengurangan secara timbal balik tarif yang berada dibawah naungan ITO. Dasar pemikiran pembentukan GATT 1947 adalah kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi negara-negara dalam hal tarif dan mengenai klausul-klausul perlindungan guna mengatur komitmen tarif. Kesepakatan-kesepakatan tambahan yang dibuat GATTberada dibawah Piagam ITO. Namun ITO dibubarkan, kemudian GATT dinyatakan sebagai ”organisasi” internasional yang diberlakukan ”*Protocol of Provisional Application”* dan menerapkan GATT sebagai perjanjian internasional yang mengikat.

Terjadinya kembali resesi ekonomi yang melanda dunia awal dasawarsa 1980-an mengakibatkan kembali tekanan pada tata perdagangan dan ekonomi dunia. Negara-negara terpaksa melakukan hambatan perdagangan “terselubung” terhadap barang impor yang merupakan gejala bagi sistem proteksionisme. Dari situasi tersebut maka dalam suatu pertemuan para Menteri Perdagangan pada tahun 1982 telah muncul pemikiran untuk menyelenggarakan suatu putaran perundingan baru.

Setelah adanya persiapan yang cukup matang oleh pihak Sekretariat GATT di Jenewa maupun delegasi Negara anggota maka pada bulan September 1986 dilangsungkan suatu pertemuan tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay yang menghasilkan kesepakatan untuk melancarkan putaran perundingan baru, yaitu putaran Uruguay. Dalam putaran ini dihasilkan suatu kesepakatan baru untuk membentuk WTO yang disertai dengan lampiran-lampirannya. WTO menggantikan peran GATT 1947 sebagai lembaga perdagangan internasional, forum negosiasi dan forum penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya dibawah persetujuan WTO, GATT tetap dipertahankan sebagai peraturan dibidang perdagangan barang. Ketentuan-ketentuan GATT masih berlaku dibawah persetujuan WTO termasuk ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan khusus atau hak-hak istimewa kepada negara-negara sedang berkembang anggota WTO.

1. ***World Trade Organization* (WTO)**

WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Kantor sekretariat WTO berlokasi di Jenewa, Swiss. Dibentuk melalui Putaran Uruguay (1986-1994). Terdapat 160 negara anggota pada 26 Juni 2014. Staf sekretariat WTO berjumlah 640, di kepalai oleh Roberto Azevêdo sebagai Direktur Jendral. Anggaran WTO pada tahun 2013 adalah 197 juta SwissFrancs. WTO adalah sebuah organisasi di bawah PBB sehingga seluruh anggota PBB dapat memanfaatkannya. WTO mempunyai dasar hukum yang kuat berupa Commercial Treaty di mana lembaga-lembaga legislative semua Negara anggota meratifikasi seluruh kesepakatan WTO dan kesepakatan tersebut berisi ketentuan-ketentuan WTO.

1. **Tujuan dan Fungsi WTO**

WTO memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.

Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingathubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipunsudah ada persetujuan-persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya,masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehinggadiperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semuaanggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkankepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnyasuatu negara dengan aturan-aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinyaperubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu Negara (lebih *predictable*).

Keberhasilan implementasi persetujuan-persetujuan dalam WTO tergantungpada dukungan Negara-negara anggotanya. Demikian pula legitimasi WTO sebagaisebuah organisasi, juga sangat tergantung pada kemauan Negara-negara anggotauntuk mematuhi persetujuan-persetujuan yang telah mereka sepakati bersama.

Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangkakelembagaan bagi hubungan perdagangan antar negara anggota dalam implementasiperjanjian dan berbagai instrument hukum termasuk yang terdapat di dalam AnnexPersetujuan WTO.Secara khusus, berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsiWTO yaitu:

1. Implementasi dari Persetujuan WTO

Fungsi pertama adalah untuk memfasilitasi implementasi administrasi danpelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian – perjanjian multilateraldan plurilateral tambahannya.

1. Forum untuk perundingan perdagangan

Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukanperundingan diantara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu – isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO.

1. Penyelesaian sengketa

Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketaWTO.

1. Mengawasi kebijakan perdagangan

Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism*/TPRM).

1. Kerjasama dengan organisasi lainnya

Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi – organisasi internasional dan organisasi – organisasi non-pemerintah.

**3.Kewenangan dalam WTO**

1. Kewenangan Tertinggi : Konferensi Tingkat Menteri (KTM)

Konferensi Tingkat Menteri mempunyai kewenangan tertinggi dalamsistem pengambilan keputusan di WTO dan bersidang sedikitnya sekalidalam dua tahun. Para menteri telah bersidang di Singapura pada bulan Desember 1996; di Jenewa pada tahun 1998; di Seattle pada tahun 1999; di Doha pada bulan November 2001 dan di Cancun pada September 2003. Para menteri tersebut memutuskan semua hal di bawah kerangka persetujuan perdagangan multilateral.

1. Kewenangan Tingkat Kedua : *General Council*Kegiatan organisasi sehari – hari ditangani oleh 3 badan :

* *The General Council* (Dewan Umum)
* *The Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa)
* *The Trade Policy Review Body* (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan).

Seluruh negara anggota WTO menjadi anggota ketiga badan utamatersebut. Pada dasarnya posisi ketiga badan ini sama. PersetujuanPembentukan WTO menegaskan bahwa seluruhnya berada di bawah GeneralCouncil meskipun masing – masing bersidang membahas persoalan yangberbeda. Ketiga badan tersebut melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepadaKonferensi Tingkat Menteri. General Council bertindak atas namaKonferensi Tingkat Menteri pada kegiatan sehari – hari untuk membahas seluruh permasalahan dalam WTO.

*General Council* bersidang sebagai *The Dispute Settlement Body* untuk mengawasi prosedur penyelesaian sengketa(Badan Penyelesaian Sengketa) dan bertindak sebagai *Trade Policy Review Body* (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan) pada saat membahaskebijakan perdagangan negara – negara anggota.

1. Kewenangan Tingkat Ketiga : Dewan – Dewan (*Council*) Tiga dewan dibawah *General Council* yang melaporkan kegiatannya pada General Council adalah sebagai berikut :

* *The Council for Trade in Goods* (*Goods Council*)
* *The Council for Trade in Services* (*Services Council*)
* *The Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (*TRIPs Council*)

Sebagaimana tercermin dalam namanya, ketiganya bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan WTO berkaitan dengan ruang lingkup perdagangan barang, jasa dan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Ketiga dewan tersebut terdiri atas seluruh negara anggota WTO. Ketiganya juga memiliki badan – badan bawahan (*subsidiary bodies*).

Terdapat enam badan lainnya yang disebut Komite yang melaporkankegiatannya langsung kepada *General Council*. Hal ini mengingat ruang lingkup bahasannya lebih kecil. Anggota komite-komite tersebut terdiri atas Negara-negara anggota WTO. Komite tersbut membahas isu-isuseperti perdagangan dan lingkungan hidup, pengaturan perdagangan regionaldan isu-isu administratif. KTM di Singapura bulan Desember 1996memutuskan untuk membentuk *Working Group* (Kelompok Kerja) baruyang menangani isu dan kebijakan kompetisi ***(****the Interaction between Trade and Competition Policy*), transparansi dalam pengadaan barang pemerintah(*Transparency in Government Procurement*) dan fasilitasi perdagangan.Selain itu terdapat dua badan tambahan lagi (*subsidiary bodies*) yangmenangani persetujuan-persetujuan plurilateral yang secara reguler melaporkan kegiatannya kepada *General Council*.

1. Kewenangan Tingkat Keempat : Membahas sampai kepada hal kecil

Setiap dewan yang lebih tinggi memiliki badan-badan bawahan(*subsidiary bodies*). Demikian pula Dewan Barang (*Goods Council*)memiliki 11 komite yang berhubungan dengan persoalan-persoalan khusus(seperti pertanian, akses pasar, subsidi, anti dumping dan seterusnya).Anggota komite ini terdiri dari semua negara anggota WTO. Komite yang juga melaporkan kegiatannya kepada *Goods Council* adalah *the Textiles Monitoring Body* (Badan Pemantau Tekstil), yang terdiri dari seorang ketua dan 10 anggota yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Di samping itu, terdapat pula kelompok-kelompok yang menangani masalah notifikasi danbadan usaha milik negara (*state trading enterprise*).

1. **Sekretariat WTO**

Kantor Sekretariat WTO berada di Jenewa, Swiss. Sekretariat terdiri dari Commitees, Council, dan Working Parties. Pada bagian-bagian dari secretariat inilah terlihat berbagai urusan yang dilayani seperti:

Commitees On:

* Trade and Evironment
* Trade and Development
* Regional Trade Agreement
* Balance of Payment Restriction
* Budged, Finance and Administration
* Specific Commintments
* Market Access
* Sanitary and Phytosanitary Measures
* Technical Barriers to Trade
* Subsidiesand Counterfiling Measures
* Anti Dumping Practice
* Customs Valuation
* Rules of Origin
* Import Licensing
* Trade-Related Investment Measures
* Safeguards
* Trade and Financial Services
* Specific Commitments

Working Parties on:

* Trade Debt and Finance
* Trade and Technology Tranfer
* Domestic Regulation
* State Trading Enterprises

Council for:

* Trade Related Aspect of Intelectual Property Right
* Trade and Services

Selain itu terdapat juga *General Settlement Body, Appellate Body* dan *Dispute Settlement Panels*. Lembaga penyelesaian sengketa dagang antar anggota inilah yang menjadi kekuatan WTO setelah GATT dengan organisasi yang lebih lemah tidak berhasil menjalankan misi penyelesaian sengketa. Sekali lagi terlihat bahwa council ini merupakan konferensi para anggota untuk mengambil keputusan yang demokratis dan adil. Terdapat lembaga penting di luar secretariat, yaitu *General Council Meeting as Trade Policy Review Body*. Lembaga inilah yang akan mengadakan perubahan ketentuan mana saja yang perlu ditinjau ulang sesuai dengan permintaan anggota atau tuntutan keadaan yang telah berubah.

1. **Keanggotaan dalam WTO**

Negara anggota GATT adalah anggota WTO. Perlu dikemukakan disini bahwa istilah anggota pada GATT bukan member, tetapi *contracting party*. Hal ini merupakan konsekuensi dari status GATT yang sifatnya, dengan meninjau sejarah berdirinya organisasi. Karena itu pula negara-negara yang ikut serta dalam GATT tidak tepat untuk disebut sebagai anggota karena memang sebutan anggota (member) hanya untuk menunjuk pada istilah peserta/pihak pada suatu organisasi internasional. Maka itu untuk GATT yang bukan organisasi ini, istilah yang tepat adalah *contracting party*.

Pada dasarnya ada dua cara untuk dapat menjadi anggota WTO. BerdasarkanPasal XXXIII GATT, suatu negara anggota dapat menjadi anggota berdasarkanprosedur normal. Untuk ini diperlukan suatu putusan dua pertiga mayoritas suaradarinegara anggota. Untuk dapat menjadi anggota, maka aksesi negara tersebut harusdisetujui oleh *Contracting Parties*. Berikut ini langkah-langkah atau proses aksesi keWTO :

1. Permintaan resmi untuk menjadi anggota
2. Negosiasi dengan seluruh anggota WTO
3. Menyusun draft keanggotaan baru
4. Keputusan akhir

Walaupun tugas-tugas WTO dijalankan oleh perwakilan Negara-negara anggota, akar kegiatannya sebenarnya bersumber pada aktivitas perdagangan dan industri sehari-hari. Kebijakan perdagangan dan posisi negosiasi dipersiapkan di ibukota negara dengan meminta saran dari pihak swasta, organisasi bisnis, petani,konsumen dan kelompok yang berkepentingan lainnya.

Sebagian besar negara-negara anggota mempunyai perwakilan diplomatik diJenewa yang dikepalai oleh seorang dubes khusus untuk WTO. Pejabat-pejabat dari perwakilan-perwakilan menghadiri sidang-sidang dewan, komite-komite, kelompok kerja dan kelompok perunding di markas besar WTO. Beberapa pejabatahli dikirim secara langsung dari ibukota negara untuk menyampaikan pandanganpemerintahnya pada persoalan khusus. Luasnya cakupan isu-isu yang dibahas olehWTO dan banyaknya materi yang dibahas yang bersifat sangat teknis, seringmenyulitkan negara berkembang dan negara terbelakang dalam mengirimkanpejabatnya untuk mengikuti berbagai sidang di WTO. Hal ini juga telah mendapatperhatian WTO untuk dibahas lebih lanjut.

## **Penyelesaian Sengketa di WTO**

WTO merupakan satu – satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan – aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara – negara anggota.[[99]](#footnote-100)

Cara-cara dan aturan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam GATT 1947 dirasakan sudah tidak mampu lagi mendukung sistem perdagangan internasional yang ada. Sehingga Negara-negara akhirnya menyepakati aturan-aturan penyelesaian sengketa yang baru sebagaimana terdapat dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes atau biasa disingkat Dispute Settlement Understanding (DSU).[[100]](#footnote-101)

Perselisihan merupakan tanggung jawab dari Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body), yang terdiri dari seluruh anggota WTO. Badan Penyelesaian Sengketa memiliki otoritas tunggal untuk membentuk "panel" ahli untuk mempertimbangkan kasus, dan untuk menerima atau menolak temuan panel 'atau hasil banding. Ia memantau pelaksanaan peraturan dan rekomendasi, dan memiliki kekuasaan untuk mengotorisasi pembalasan ketika suatu negara tidak sesuai dengan putusan.[[101]](#footnote-102)

Anggota-anggota WTO telah melakukan komitmen mereka untuk tidak mengambil aksi unilateral terhadap penyimpangan dari aturan perdagangan, tetapi mencari jalan di dalam suatu sistem penyelesaian perselisihan multilateral dan mematuhi aturan-aturan dan putusan-putusannya. Dengan menandatangani dan meratifikasi WTO, tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non tarif maupun perlakuan secara nasional (national treatment).

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO sekarang ini intinya berpatokan pada ketentuan pasal XXII-XXIII GATT 1947. Yang berbunyi :[[102]](#footnote-103)

*Article XXII*

*Consultation*

*1. Each contracting party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as may be made by another contracting party with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.*

*2. The CONTRACTING PARTIES may, at the request of a contracting party, consult with any contracting party or parties in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1.*

*Article XXIII*

*Nullification or Impairment*

*1. If any contracting party should consider that any benefit accruing to it directly or indirectly under this Agreement is being nullified or impaired or that the attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result of*

*(a) the failure of another contracting party to carry out its obligations under this Agreement, or*

*(b) the application by another contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement, or*

*(c) the existence of any other situation,*

*the contracting party may, with a view to the satisfactory adjustment of the matter, make written representations or proposals to the other contracting party or parties which it considers to be concerned. Any contracting party thus approached shall give sympathetic consideration to the representations or proposals made to it.*

*2. If no satisfactory adjustment is effected between the contracting parties concerned within a reasonable time, or if the difficulty is of the type described in paragraph 1 (c) of this Article, the matter may be referred to the CONTRACTING PARTIES. The CONTRACTING PARTIES shall promptly investigate any matter so referred to them and shall make appropriate recommendations to the contracting parties which they consider to be concerned, or give a ruling on the matter, as appropriate. The CONTRACTING PARTIES may consult with contracting parties, with the Economic and Social Council of the United Nations and with any appropriate inter-governmental organization in cases where they consider such consultation necessary. If the CONTRACTING PARTIES consider that the circumstances are serious enough to justify such action, they may authorize a contracting party or parties to suspend the application to any other contracting party or parties of such concessions or other obligations under this Agreement as they determine to be appropriate in the circumstances. If the application to any contracting party of any concession or other obligation is in fact suspended, that contracting party shall then be free, not later than sixty days after such action is taken, to give written notice to the Executive Secretary¹ to the CONTRACTING PARTIES of its intention to withdraw from this Agreement and such withdrawal shall take effect upon the sixtieth day following the day on which such notice is received by him. “*

Selain itu Prosedur penyelesaian sengketa dagang dalam WTO *Dispute Settlement Understanding* (DSU)[[103]](#footnote-104). Tergugat dalam tempo 10 hari (kecuali disepakati lain) harus menyampaikan jawaban atas permintaan tersebut. Jika dalam 10 hari tidak ada jawaban atau tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari, pihak penggugat dapat meminta DSB untuk dibentuk panel.[[104]](#footnote-105) Disamping prosedur resmi, Dirjen WTO/GATT berdasarkan kapasitas sebagai pejabat tinggi WTO dapat menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

## **Proses Penyelesaian Sengketa Melalui *Dispute Settlement Body***

Pada tahun 1988 WTO mengadakan pertemuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan di Montreal yang masih dalam kerangka Putaran Uruguay. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan pembentukan suatu badan khusus penyelesaian sengketa yaitu Dispute Settlement Body (DSB).[[105]](#footnote-106) Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Badan ini terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus, dan satu-satunya yang memiliki otoritas membentuk Panel. (Panel secara resmi bertugas membantu DSB(Dispute Settlement Body) membuat keputusan atau rekomendasi). DSB (Dispute Settlement Body) dapat menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB (Dispute Settlement Body) juga memonitor pelaksanaan putusan dan merekomendasi serta memiliki kekuasan untuk mengesahkan retaliasi, jika suatu negara tidak mematuhi keputusan.

DSB dalam menyelesaikan sengketa memiliki beberapa prinsip yakni:[[106]](#footnote-107)

### Penyelesaian sengketa dilakukan dengan Adil, Cepat, Efektif dan saling menguntungkan.

### Mengutamakan perundingan dan menyelesaikan masalah tanpa harus membentuk panel.

### Suatu putusan disahkan hanya berdasarkan konsensus. Ini artinya bahwa jika ada keberatan dari suatu negara, maka tidak akan ada keputusan. Dibawah WTO putusan secara otomatis disahkan kecuali ada konsensus untuk menolak hasil putusan. Negara yang ingin merintangi keputusan harus mendekati seluruh anggota WTO, termasuk lawan sengketanya, untuk membatalkan keputusan panel.

DSB berwenang untuk membentuk panel, mengadopsi panel dan Mahkamah laporan Badan, mempertahankan pengawasan pelaksanaan keputusan dan rekomendasi, dan memberikan kewenangan penangguhan konsesi dan kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian tertutup. Sehubungan dengan sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian tertutup yang merupakan Persetujuan Perdagangan Plurilateral, istilah "Anggota" yang digunakan disini hanya mengacu kepada mereka Anggota yang merupakan pihak dalam Perjanjian Perdagangan Plurilateral relevan. Dimana DSB mengelola ketentuan penyelesaian sengketa dari Persetujuan Perdagangan Plurilateral, hanya anggota yang pihak pada Persetujuan yang dapat berpartisipasi dalam keputusan atau tindakan yang diambil oleh DSB sehubungan dengan sengketa itu.[[107]](#footnote-108)

Atas permintaan para pihak akan dibentuk sebuah Panel yang keanggotaannya terdiri dari individu-individu pemerintah dan/atau non pemerintah yang cakap, pernah bertugas sebagai utusan negara di WTO, atau mengajar, atau menerbitkan buku tentang hukum atau kebijakan perdagangan internasional, juga yang pernah bertugas sebagai pejabat perdagangan senior di negara-negara anggota.[[108]](#footnote-109)Penalis akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai utusan pemerintah atau organisasi.[[109]](#footnote-110) Fungsi panel adalah membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau keputusan. Panel harus berkonsultasi secara teratur dengan pihak-pihak yang bersengketa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.[[110]](#footnote-111)

Dispute Settlement Body mendirikan Lembaga Banding permanen yang akan mengadili banding dari tingkat Panel. Lembaga ini terdiri atas tujuh orang personil, dan tiga diantaranya akan bertugas dalam setiap kasus.[[111]](#footnote-112) Lembaga ini terdiri atas orang-orang yang kemampuannya diakui, baik di bidang hukum perdagangan internasional mau pun persoalan – persoalan yang diatur perjanjian WTO pada umumnya, dan tidak berafiliasi dengan pemerintah.[[112]](#footnote-113)Pengajuan banding terbatas pada persoalan hukum yang terdapat dalam laporan Panel serta interpretasi yang dilakukan Panel. Lembaga Banding berwenang pula untuk mempertahankan, mengoreksi dan merubah temuan hukum serta kesimpulan Panel.[[113]](#footnote-114)

Selain penyediaan sarana penyelesaian sengketa secara hukum, DSU memberi kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara konsultasi, jasa-jasa baik (*good offices*), konsiliasi, dan mediasi.[[114]](#footnote-115)

DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan. Tiap pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding atas putusan panel. Kadang-kadang kedua belah pihak sama-sama mengajukan banding.

Tabel. 1 Perkiraan setiap tahap dari prosedur penyelesaian sengketa

|  |  |
| --- | --- |
| 60 hari | Konsultasi, mediasi, dll |
| 45 hari | Panel mengatur dan panelis ditunjuk |
| 6 bulan | Laporan akhir panel kepada pihak |
| 3 minggu | Laporan final panel ke Anggota WTO |
| 60 hari | DSB menyetujui laporan (bila tanpa banding |
| Total = 1 tahun | (tanpa Banding) |
| 60-90 hari | Laporan Banding |
| 30 hari | DSB menyetujui Laporan Banding |
| Total = 1 tahun 3 bulan | Dengan Banding |

Perselisihan Penampungan merupakan tanggung jawab dari Badan Penyelesaian Sengketa (Dewan Umum secara samar), yang terdiri dari seluruh anggota WTO. Badan Penyelesaian Sengketa memiliki otoritas tunggal untuk membentuk "panel" ahli untuk mempertimbangkan kasus ini, dan untuk menerima atau menolak temuan panel 'atau hasil banding. Ia memantau pelaksanaan peraturan dan rekomendasi, dan memiliki kekuasaan untuk mengotorisasi pembalasan ketika suatu negara tidak sesuai dengan putusan.

Sebelum mengambil tindakan lain negara dalam sengketa harus berbicara satu sama lain untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan perbedaan mereka sendiri. Jika gagal, mereka juga dapat meminta direktur jenderal WTO untuk menengahi atau mencoba membantu dengan cara lain. Jika konsultasi gagal, negara dapat meminta DSB WTO untuk panel yang akan ditunjuk. Secara resmi, panel adalah membantu DSB dalam membuat keputusan atau rekomendasi. Tapi karena laporan panel tersebut hanya dapat ditolak oleh konsensus dalam Badan Penyelesaian Sengketa, sehingga sulit untuk membatalkan laporan panel. Laporan akhir panel harus diberikan kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu enam bulan. Dalam kasus yang mendesak, seperti barang-barang yang tidak tahan lama, batas waktu dipersingkat sampai tiga bulan.

Laporan akhir diserahkan kepada kedua belah pihak dan tiga minggu kemudian diedarkan kepada semua anggota WTO, untuk mengetahui apabila melanggar perjanjian atau kewajiban yang sudah ada. Apabila demikian laporan akan menyesuaikan dengan aturan WTO. dalam waktu 60 hari laporan akhir panel tersebut akan menjadi putusan DSB kecuali consensus menolaknya. Kedua belah pihak dapat mengajukan banding.[[115]](#footnote-116)

## **Peran DSB WTO dalam Kasus Pelarangan Impor apel Selandia Baru oleh Australia**

Pemerintahan Australia pada tahun 2007 lewat dinas karantina flora dan fauna menyatakan bahwa Apel import yang berasal dari Selandia Baru berbahaya bagi kesehatan karena mengandung dua unsur berbahaya, yaitu bakteri *fire bright, European cancer* dan serangga penyebab *pest* . Dengan ditemukannya bakteri tersebut pada apel Selandia Baru, dinas karantina flora dan fauna merekomendasikan kepada pemerintah khusnya kepada kementerian luar negeri dan perdagangan Australia untuk menghentikan import apel yang berasal dari Selandia Baru .

Masalah ini tidak berawal pada tahun 2007 saja, sejak tahun 1921 pemerintah Australia telah menghentikan import apel dari Selandia Baru dikarenakan oleh hal yang sama. Namun, sejak masalah ini bergulir Selandia Baru tidak tinggal diam dan terus memperbaiki kualitas apelnya agar bisa bersaing dan masuk pasar Australia. Laporan dinas karantina Australia tersebut segera di analisa secara ilmiah oleh pihak Selandia Baru. Lewat serangkaian uji coba oleh pakar ilmuan dari Selandia Baru tidak di temukan bakteri-bakteri berbahaya tersebut. Dan berdasar dari uji coba ilmiah tersebut, Selandia Baru mempertimbangkan bahwa apa yang dikeluarkan oleh dinas karantina dan departemen luar negeri dan perdagangan adalah hal yang tidak sesuai dengan bukti scientific.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Selandia Baru mengajukan sengketa tersebut untuk di bahas dan diselesaikan lebih lanjut lewat forum WTO. Karena Selandia Baru berpendapat bahwa kebijakan Australia mengenai larangan import apel merupakan kebijakan yang tidak berdasar secara ilmiah . Dan merupakan pelanggaran terhadap *Uruguay Round Agreement* sebagai dasar terlaksananya perdagangan bebas di dunia. Pelanggaran terhadap *Uruguay Round Agreement* tersebut lebih di spesidikan terhadap *Agreement of Sanitary* *and Phytosanitary Measures* dari *Articles I-XIV* , Australia melanggar beberapa artikel.

Setiap negara wajib mengontrol kontaminasi makanan dan besarnya ukuran kontaminasi makanan. Inspeksi juga di wajibkan bagi negara pengimport barang tersebut untuk *quality control* dari suatu produk yang akan masuk kenegaranya. Apa yang terjadi dalam persengkataan dagang antara Selandia Baru-Australia ini, Selandia Baru berpendapat bahwa terjadi *malfunction* dari sistem inspeksi Australia dalam mengontrol kualitas apel Selandia Baru yang berakibat kepada kerugian yang di derita Selandia Baru. Pasal terakhir adalah *Article XI* yang merupakan cara yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa mengenai SPS (*Sanitary and Phytosanitary Measures*) tersebut. Dalam pasal ini disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan SPS dapat diselesaikan dengan cara konsultasi dan dilakukan dengan perundingan antara kedua belah pihak dengan WTO sebagai penengahnya. Hal ini sesuai dengan artikel GATT tahun 1994 nomer XXII dan XXIII. Dimana setiap persengketaan perdagangan antara kedua negara atau lebih dapat diselesaikan dengan konsultasi dan perundingan.

Berikut adalah proses persengketaan yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus selandia baru-Australia :

### Konsultasi, Negara-negara yang terlibat bertemu untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut;

### Tahap Panel, Jika konsultasi tidak menyelesaikan masalah ini, negara yang bersengketa dapat meminta dibentuknya sebuah panel ajudikatif untuk menghasilkan putusan. Panel terdiri dari tiga anggota yang mendengar argumentasi dari pihak yang bersengketa dan setiap pihak ketiga yang berkepentingan.Jika panel memutuskan bahwa tindakan tersebut telah melanggar perjanjian WTO, maka dewan panel akan memanggil negara yang bersangkutan untuk ditindak secara hukum atau kebijakan yang sejalan dengan perjanjian tersebut. Dalam kasus impor apel antara Australia dan Selandia Baru ini, WTO membentuk panel yg terdiri dari beberapa negara anggota WTO (Chili, Komunitas Eropa, Jepang, Cina Taipei dan Amerika Serikat, Pakistan) untuk menjadi dewan penengah dan memberikan keputusan terkait konflik ini. Setiap beberapa bulan sekali dewan panel akan memberikan laporan mengenai penelitian mereka terhadap pertanian Selandia Baru dan Australia.

### Banding, Dalam proses penyelesaian sengketa, WTO jug amemberikan salah satu pihak yang bersengketa hak banding kepada Badan Banding. Hak banding terbatas pada isu-isu hukum yang didasarkan pada laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel.

### Hasil Keputusan WTO Terhadap Penyelesaian Kasus, Persengketaan perdagangan yang terjadi antara Australia dengan Selandia Baru terkait dengan kasus apel telah berlangsung selama puluhan tahun dan baru diajukan ke *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 31 Agustus 2007. Penyelesaian kasus persengketaan dagangan tersebut memakan waktu yang cukup lama pada tahap penyelidikan oleh panel-panel di WTO sehingga baru pada tahun 2010 diketahui hasil laporan terkait kasus tersebut.

Pada perkembangannya digunakan mekanisme panel-panel dalam melakukan penyelidikan dan juga mendengarkan pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam konteks ini Australia dan Selandia Baru.Sehingga dengan prosedur yang panjang tersebut keputusan terhadap sengketa tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang singkat. WTO sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa dagang antar negara seperti sengketa dagangan apel ini melalui badan khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa atau Dispute Settlement Body(DSB) yang kemudian memiliki prosedur tersendiri melalui Appellate Body dan Panels dimana terdiri dari negara-negara yang mengajukan diri untuk membantu menyelesaikan suatu persengketaan. Sehingga DSB sendiri mendasarkan keputusannya pada hasil laporan *Appellate Body* dan *Panels* tersebut

Dalam laporan yang berasal dari *Appellate Body* dan *Panels* disebutkan bahwa langkah-langkah yang diadopsi/digunakan oleh pemerintah Australia dalam kasus impor apel Selandia Baru berjumlah 16 menyangkut fitosanitasi. Menurut panel-panel tersebut, ke-16 langkah-langkah yang diadopsi oleh Australia tidak berdasarkan pada prinsip pengkajian resiko yang sesuai dan oleh karenanya menjadi tidak konsisten terhadap *Article V(1)* dan *Article V(2)* dari SPS Agreement. Selain itu, panel-panel tersebut menambahkan kesimpulan bahwa langkah-langkah Australia juga tidak konsisten dengan *Article II(2) SPS Agreement*, yang menetapkan syarat bahwa ketentuan SPS harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan tidak dapat dipertahankan apabila tidak terdapat cukup bukti ilmiah. Oleh karena itu berdasarkan laporan, langkah-langkah yang ditempuh oleh Australia cenderung mengarah pada hambatan perdagangan daripada ke arah perlindungan fitosanitari itu sendiri sehingga Australia kembali tidak konsisten pada *Article V(6)* dari SPS Agreement .Selandia Baru sendiri juga telah memberikan alternatif bagi Australia terhadap impor apel mereka agar melakukan impor terhadap apel yang matang dan tanpa gejala dan ditambah lagi dengan melakukan inspeksi apel-apel impor tersebut.

Dalam *Dispute Settlement Body* WTO, prosedur yang ditetapkan terkait penyelesaian sengketa adalah dengan memberikan jangka waktu bagi pihak yang “kalah” untuk merubah aturannya dan tidak menerapkan bentuk hukuman (*punishment*) bagi yang “kalah”. Berdasarkan laporan-laporan dan rekomendasi dari Appellate Body dan Panels tersebut DSB kemudian memberi keputusan bahwa langkah-langkah yang diadopsi oleh Australia tidak konsisten dengan SPS Agreement dan riset ilmiah yang dilakukan oleh Australia tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WTO terkait dengan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit yang dibawa oleh hewan atau tanaman. Oleh karena itu, maka DSB WTO meminta agar Australia mengubah aturannya agar sesuai dengan SPS Agreement. Putusan tersebut juga otomatis memenangkan Selandia Baru atas kasus sengketa apel yang telah berlangsung sejak lama terhadap Australia sehingga diharapkan dengan kemenangan tersebut impor apel dari Selandia Baru ke Australia menjadi semakin mudah dan dengan hubungan antar negara yang tetap harmonis.

**BAB 5**

**ASEAN *Economic Community* (AEC) / Masyarakat Ekonomi ASEAN**

**A.Gambaran Umum ASEAN**

**1. Sejarah ASEAN**

ASEAN adalah singkatan dari *Association of South East Asian Nations* yang berarti Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia tenggara yang merupakan organisasi unik yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.[[116]](#footnote-117) Sejarah awal berdirinya Asean ditandai dengan sebuah situasi dimana kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh kekuatan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Salah satu bukti persaingan antarnegara adidaya dan kekuatan besar pada waktu itu adalah Perang Vietnam antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan Komunis dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan Barat pimpinan Amerika Serikat. Persaingan dua blok tersebut menyeret negara-negara di kawasan ASEAN menjadi basis kekuatan militer Blok Komunis dan Barat. Blok Komunis di bawah komando Uni Soviet menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat di bawah komando Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Filipina.[[117]](#footnote-118)

Selain terjadi persaingan di bidang ideologi antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur, juga terjadi konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara, yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam; konflik bilateral, seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam; dan konflik internal, seperti di Kamboja, Thailand, dan Indonesia. Situasi persaingan pengaruh ideologi dan kekuatan militer yang dapat menyeret negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik bersenjata yang menghancurkan itu membuat para pemimpin negara-negara di kawasan ASEAN sadar bahwa perlu ada suatu kerjasama yang dapat meredakan sikap saling curiga di antara negara anggota serta mendorong usaha pembangunan bersama di kawasan ASEAN.[[118]](#footnote-119)

Untuk mewujudkan gagasan para pemimpin tersebut beberapa inisiatif yang telah dilakukan, antara lain, adalah pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia (ASA)*, Malaya–Philippina–Indonesia (MAPHILINDO), Traktat Organisasi Asia Tenggara (*South East Asia Treaty Organization/SEATO*), dan Dewan Asia-Pasifik (*Asia and Pacific Council/ASPAC*). [[119]](#footnote-120)

Meskipun mengalami kegagalan, upaya dan inisiatif tersebut telah mendorong para pemimpin di kawasan untuk membentuk suatu organisasi kerja sama di kawasan yang lebih baik. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melakukan berbagai pertemuan konsultatif secara intens sehingga disepakati suatu rancangan Deklarasi Bersama (*Joint Declaration*) yang isinya mencakup, antara lain, kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik dan membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara di kawasan yang terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.[[120]](#footnote-121)

Untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1967, bertempat di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu para Menteri Luar Negeri Indonesia – Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia – Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina – Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura – S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand – Thamat Khoman melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*) atau Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*).[[121]](#footnote-122)

Dua halaman deklarasi ASEAN berisikan maksud dan tujuan asosiasi, yang meliputi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan bidang lainnya, dan upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menghormati rasa keadilan dan aturan hukum serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.[[122]](#footnote-123)

Lambat laun organisasi ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan di bidang politik dan ekonomi, seperti disepakatinya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN*) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 lima negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation/TAC*) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini mendorong negara-negara di Asia Tenggara lainnya bergabung menjadi anggota ASEAN. Saat ini jumlah keanggotaan ASEAN meningkat dari 5 negara menjadi 10 negara dengan masuknya 5 negara baru. Diantara kesepuluh negara ASEAN, Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah mengalami dekolonialisasi pada saat Perang Dunia ke-II.[[123]](#footnote-124)

Proses penambahan keanggotaan ASEAN sehingga anggotanya 10 negara adalah sebagai berikut:

1. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) di Jakarta, Indonesia.
2. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada tanggal 29-30 Juli 1995 dalam Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
3. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN tanggal 23-28 Juli 1997 dalam pada Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia.
4. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi, Vietnam.

Dengan diterimanya Kamboja sebagai anggota ke-10 ASEAN, cita-cita para pendiri ASEAN yang mencakup sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.[[124]](#footnote-125)

**B. Fungsi dan Tujuan Pembentukan ASEAN**

“Deklarasi Bangkok”, sebuah dokumen yang hanya terdiri dari lima artikel, mempunyai arti yang sangat penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dokumen ini mendeklarasikan pendirian dari sebuah asosiasi untuk kerjasama regional diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan menegaskan maksud dan tujuan dari didirikannya ASEAN.[[125]](#footnote-126) Maksud dan tujuan didirikannya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah :

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara- negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana penangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;
6. Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tengara;
7. Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi- organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.[[126]](#footnote-127)

Meskipun secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerjasama regional yang menitikberatkan pada kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun Deklarasi Bangkok merupakan suatu komitmen politik negara- negara anggota ASEAN untuk bersatu dan bekerjasama untuk mewujudkan tujuan ASEAN, walaupun kondisi Asia Tenggara pada saat itu diwarnai dengan pergolakan yang terjadi di antara negara-negara di kawasan tersebut, maupun antar kekuatan di luar kawasan. Aspirasi politik yang menjadi dasar dari Deklarasi Bangkok berusaha untuk mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional masing-masing negara anggota ASEAN di segala bidang.

**C. Organ-Organ ASEAN**

Struktur organisasi ASEAN yang selama ini berdasarkan Deklarasi Bangkok mengalami perubahan setelah penandatanganan Piagam ASEAN. Struktur organisasi sesuai Deklarasi Bangkok atas: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting*/AMM),[[127]](#footnote-128) Pertemuan Kementerian Sektoral (*Sectoral Bodies Ministerial Meeting*), dan Sidang Komite Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee*/ASC).

Struktur organisasi ASEAN yang baru sesuai dengan Piagam ASEAN sebagai berikut:[[128]](#footnote-129)

1. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang melakukan pertemuan 2 kali setahun termasuk pertemuan KTT ASEAN dan KTT ASEAN terkait lainnya.
2. Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council*) yang atas para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*).
3. Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*) dengan ketiga pilar komunitas ASEAN, yakni Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council*), Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Council*), dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community Council*).
4. Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (*ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*).
5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari Wakil Tetap negara ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta.
6. Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.
7. Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN.
8. Badan HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Body*) yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN.
9. Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*) yang akan membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN.
10. Entitas yang berhubungan dengan ASEAN (*Entities associated with ASEAN*).[[129]](#footnote-130)

**D. Keanggotaan ASEAN**

Sesuai dengan pasal 4, Deklarasi Bangkok 1967; keanggotaan ASEAN terbuka bagi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan syarat negara calon anggota menyetujui dasar-dasar dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN serta adanya kesepakatan semua negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru di ASEAN. Hal ini berarti ASEAN juga membuka kesempatan untuk bergabung bagi negara-negara sosialis yang ada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengindikasikan itikad baik para pendiri ASEAN untuk mewujudkan sebuah tata regional yang tidak mempermasalahkan perbedaan ideologi.

Usaha-usaha untuk memperluas ASEAN dengan menambah jumlah anggota mulai dilakukan sejak tahun 1967 menjelang dibentuknya ASEAN, yaitu dengan mengajak Myanmar, Kamboja, dan Laos. Akan tetapi negara-negara tersebut menyatakan belum bisa ikut serta karena sedang melakukan pembangunan bangsa. Namun mereka juga tidak menentang usaha-usaha negara pemrakarsa untuk mewujudkan ASEAN. Pada saat ini Vietnam memang tidak didekati oleh para pendiri ASEAN karena keterlibatannya dalam peperangan dengan Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok maka Brunai Darussalam resmi diterima sebagai anggota ASEAN yang keenam dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, pada 7 Januari 1984. Pasca berakhirnya perang dingin dan negara-negara lain di Asia Tenggara selesai melaksanakan pembangunan bangsanya, berangsur-angsur permintaan untuk menjadi anggota ASEAN mulai bermunculan. Dimulai pada tahun 1992 dimana Vietnam dan Laos menyatakan kesediaan mereka untuk menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara dan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian mereka memperoleh status sebagai peninjau dalam ASEAN.[[130]](#footnote-131)

Pada bulan Februari 1994, perdana menteri Vietnam menyatakan bahwa negaranya siap untuk menjadi anggota penuh ASEAN dan resmi menjadi anggota ASEAN yang ketujuh pada 28 Juli 1995. Sementara itu pada tanggal yang sama, Kamboja menyusul Vietnam dan Laos menjadi pihak pada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Dua tahun kemudian tepatnya pada 23 Juli 1997 Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ASEAN yang kedelapan dan kesembilan. Masuknya dua negara tersebut semakin mendekatkan ASEAN pada harapan para *Founding father* untuk menciptakan sebuah organisasi bagi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Kamboja merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang terakhir masuk menjadi anggota ASEAN, adanya konflik di negara ini mengakibatkan tertundanya keanggotaan Kamboja di ASEAN. Baru pada tanggal 30 April 1999 cita-cita ASEAN untuk menyatukan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara dibawah lambang ASEAN bisa terwujud dengan resminya Kamboja menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh.[[131]](#footnote-132)

Ketika ASEAN genap memiliki anggota sepuluh negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos dan Myanmar banyak pengamat ASEAN mengatakan formasi-10 adalah final bagi ASEAN. Akan tetapi, ketika Timor Leste melamar menjadi anggota ASEAN, maka ASEAN memasuki babak baru. Alasan Timor Leste menjadi anggota ASEAN adalah ingin mengamankan kepentingan politik dan ekonomi negerinya yang kecil dari negara-negara besar di sekelilingnya, yang mempunyai peluang melakukan invasi. Jika Timor Leste menjadi anggota ASEAN, maka bargaining position Timor Leste akan semakin meningkat di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional. Bagi ASEAN, masuknya Timor Leste ke ASEAN adalah bukti bahwa organisasi regional ini mempunyai peranan yang cukup kuat dalam menciptakan stabilitas regional dan perdamaian.

Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN dengan kriteria: letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara, pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN, dan kesepakatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam ASEAN dan kesanggupan serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Di samping itu, penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh KTT ASEAN berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara Pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan aksesi Piagam ASEAN.[[132]](#footnote-133)

Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama yang diatur dalam Piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara anggota ASEAN wajib mengambil langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Jika terjadi suatu pelanggaran serius atau ketidakpatuhan negara anggota ASEAN terhadap Piagam, penyelesaiannya merujuk ke KTT untuk diputuskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Piagam ASEAN. Dalam perkembangannya, terdapat keinginan dari beberapa negara untuk menjadi anggota ASEAN, antara lain, Timor Leste dan Papua Nugini.[[133]](#footnote-134)

**E.Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of* ASEAN *Concord* *II* (Bali *Concord II*), Bali, Oktober 2003. MEA adalah salah satu pilar perwujudan ASEAN *Vision*, bersama-sama dengan ASEAN *Security Community* (ASC) dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN *Vision* 2020:

*... to create a stable, prosperous and highly competitive* ASEAN *economic region in which there is a free flow ofgoods, services, investment, skilled labor and a freer flow of capital, pital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.*

Pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Upaya pencapaian masing-masing kerangka tersebut dilakukan melalui berbagai elemen dan strategi yang tercakup di dalamnya.

Pencapaian MEA melalui penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integrasi regional untuk mencapai Skala ekonomis yang optimal. Langkah-langkah integrasi tersebut (proses liberalisasi dan penguatan internal ASEAN) menjadi strategi mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Pembentukan MEA juga menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi internasional, baik dalam merespon meningkatnya ke­cenderungan kerja sama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, dan India.

Melalui proses integrasi ekonomi maka ASEAN secara bertahap menjadi kawasan yang membebaskan perdagangan barang dan jasa Serta aliran faktor produksi (modal dan tenaga kerja), sekaligus harmonisasi peraturan-peraturan terkait lainnya. Strategi pencapaian MEA mengacu pada *Vientiane Action Programme* (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja mewujudkan ASEAN *Vision*. Berdasarkan VAP, *High Level Task Force*-HLTF memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi.

Secara umum, HLTF merekomendasikan pendekatan integrasi ekonomi melalui prosedur dan kebijakan baru untuk memperkuat implementasi beberapa inisiatif ekonomi yang sudah ada, termasuk ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) dan ASEAN *Investment Area* (AIA); mempercepat integrasi regional di sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan tenaga kerja ahli dan bisnis; memperkuat institusi ASEAN, termasuk perbaikan lembaga ASEAN *Dispute* *Settlement Mechanism* dalam menjamin kecepatan dan kekuatan hukum apabila terjadi sengketa. Di luar itu, juga diupayakan agar integrasi ekonomi yang berlangsung memberikan manfaat bagi seluruh anggota ASEAN khususnya negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (atau disebut CLMV). Dengan strategi tersebut diharapkan negara ASEAN secara bersama-sama dapat mencapai MEA pada 2015.

Pencapaian MEA memerlukan implementasi langkah-langkah liberalisasi dan kerja sama, termasuk peningkatan kerja sama dan integrasi di area-area baru antara lain: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas (*capalty-building*); konsultasi yang lebih erat di kebijakan makroekonomi dan keuangan; kebijakan pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur dan hubungan komunikasi; pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; integrasi industri untuk meningkatkan sumber daya regional; serta peningkatan keterlibatan sektor swasta.

Adalah sangat penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur inti (*core elements*) MEA, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memungkinkan menciptakan suatu wilayah Asia Tenggara sebagai suatu pasar dan landasan produksi tunggal. Karena itu agenda kerja sama ekonomi ASEAN harus memusatkan perhatian pada upaya integrsi "*turning the diversity that characterises the region into opportuni­ties for business complementation making* ASEAN *a more dynamic and stronger segment of the global supply chain*". Sasaran pencapaian suatu pasar dan landasan produksi tunggal, dengan peredaran bebas barang, jasa dan modal merupakan pengakuan bahwa *economic survival* ASEAN sebagai suatu pasar regional tunggal akan lebih besar dari pada sejumlah ekonomi-ekonomi nasional. Kemungkinan untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terintegrasi memungkinkan Asia Tenggara mengambil manfaat ekonomi China dan India yang tumbuh dengan pesat. Unsur-unsur inti (*Core Element*) MEA dalam menciptakan suatu integrasi pasar tunggal antara lain;

**1.Liberalisasi Investasi**

Ada tiga komponen ASEAN *Investment Area* (AIA), yaitu fasilitasi investasi, promosi investasi dan liberalisasi investasi. Kegiatan yang sedang berjalan di bidang fasilitasi investasi dan promosi investasi harus didukung dengan kuat melalui pembentukan "ASEAN Regional Unit" sebagai suatu lembaga baru. Lembaga ini bisa dimulai dengan menjadikannya bagian dari Sekretariat ASEAN.

Melihat perkembangan global maupun di wilayah ASEAN, komponen liberalisasi investasi tidak lagi memberikan perlakuan khusus bagi investor dari ASEAN sendiri. Dalam rangka liberalisasi rezim investasi mereka tidaklah selamanya tepat bila negara-negara ASEAN harus mendapat preferensi terlebih dahulu sebelum kesempatan preferensi yang sama diberikan kepada investor-investor non-ASEAN.

Dalam upaya membuat ASEAN menjadi landasan produksi tunggal yang kompetitif sangatlah penting untuk menarik FDI yang berkualitas paling baik dalam kuantitas yang sebesar mungkin terlepas dari negara asalnya. Harus diingat pula bahwa arus masuk investasi langsung tidak digerakkan oleh negara-negara anggota ASEAN, melainkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Uni Eropa- dan jepang.[[134]](#footnote-135)

Dalam kaitan ini ASEAN harus membuat dua keputusan penting. Pertama, melangkah lebih jauh dari rekomendasi HILTF sebagaimana tertuang dalam *Bali* *Concord II* dan membuka semua sektor manufaktur bagi investasi asing. Hal ini tentu berarti bahwa *temporary exclusion list* (TEL) dan *sensitive list* dalam sektor manufaktur dengan menggunakan ASEAN-X formula tidak diperlukan lagi. Kedua, ASEAN harus membuka diri bagi investor dari manapun juga dan tidak lagi membedakan antara investasi dari ASEAN dan non-ASEAN.

Untuk membangun suatu landasan produksi tunggal, ASEAN harus mendorong pembentukan jejaring produksi regional di Asia Tenggara. Kecenderungan global di sektor manufaktur menunjukkan suatu pergeseran ke pengadopsian teknik-teknik produksi yang fleksibel dan pembangunan jejaring produksi yang terintegrasi. Kompetisi global yang ketat mengakibatkan *cost effective* tidak lagi dapat dicapai apabila seluruh rangkaian manufaktur masih dilakukan di dalam satu perusahaan (*in-house*) atau di dalam satu negara. Untuk mempersingkat rangkaian dan waktu produksi dan pengantaran ke pasar yang cepat, perusahaan-perusahaan multinasional harus mengintegrasikan kegiatan manufaktur mereka di berbagai lokasi dan memperkenalkan teknik manajemen *just-in-Time* dan Sering kali melalui subkontrak internasional. Kecenderungan produksi global ini berarti bahwa produsen tidak hanya harus mencari pasar yang lebih besar, melainkan uga tempat-tempat di mana mereka dapat membangun jejaring produksi yang efisien.

Strategi perusahaan multinasional yang kini muncul menunjukkan bahwa mereka sudah merencanakan untuk memanfaatkan wilayah Asia Tenggara sebagai landasan produksi untuk dapat memperbesar volume penjualan mereka di pasar ASEAN dengan sekaligus mengembangkan sarana perolehan komponen di wilayah ASEAN, peningkatan spesialisasi produk untuk mencapai *economies Of scale*, dan pementingan keuntungan atas dasar operasi di wilayah ASEAN.

*HLTF on ASEAN Economic Integration* juga menyarankan pembentukan jejaring ASEAN *Free Trade Zones,* sehingga perusahaan-perusahaan dapat menstrukturkan proses manufaktur mereka melintasi berbagai negara ASEAN' guna memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif mereka dan di dalam proses itu meningkatkan perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Kemudian, ASEAN harus pula melakukan fasihtasi bersama dan upaya promosi yang lebih efektif dan mengembangkan sumber-sumber investasi asing langsung ke dalam seperti dari China, India dan Republik Korea, untuk melengkapi investasi asing langsung dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan jepang.

**2.Liberalisasi Perdagangan**

Arus produk manufaktur yang bergerak bebas sangat penting untuk mempromosikan ASEAN sebagai landasan produksi tunggal. ASEAN sudah melaksanakan liberalisasi perdagangan melalui AFTA. Dalam rangka penurunan tarif, suatu kemajuan yang besar sudah dicapai dengan AFTA. Arus bebas tidak hanya berarti penghapusan tarif, melainkan harus sekaligus pula berarti penghapusan rintangan non-tari f.

Intra-ASEAN, khususnya barang-barang manufaktur. Bagi beberapa negara, termasuk negara-negara CMLV, hal ini merupakan suatu tantangan karena tarif atas perdagangan internasional memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan negara. Negara-negara tersebut harus menerima hal ini dan mencari mekanisme untuk mengatasinya.

Suatu analisis dari perdagangan intra-ASEAN memperlihatkan adanya landasan produksi regional di ASEAN. Penurunan dalam kontribusi produk yang berlandaskan sumber daya alam (*resource-based products*) dalam perdagangan intra-ASEAN selama 20 tahun disertai. dengan peningkatan ekspor produk listrik dan elektronik, yang kini hampir mencapai separuh dari arus dagang ASEAN. Sebagian besar dari produk-produk ini terdiri atas suku cadang dan komponen. Kecenderungan ini menunjukkan suatu potensi yang jelas bagi *production sharing* sebagai bagian dari jejaring produksi regional.[[135]](#footnote-136)

**3.Fasilitasi Perdagangan dan Bisnis**

Akses yang meningkat sebagai akibat dari penurunan rintangan tarif dan non-tarif tidaklah cukup untuk menjamin arus barang yang bebas di ASEAN. Biaya transaksi yang tinggi bagi perdagangan internasional yang antara lain disertai bea-cukai yang tidak efisien dan standar yang tidak jelas dapat menurunkan nilai perdagangan secara signifikan.

ASEAN perlu segera mengupayakan penurunan biaya transaksi ini dengan cepat dan drastis. upaya ini memerlukan suatu komitmen yang jauh lebih besar daripada upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah akses pasar. Inisiatif fasilitasi ini sering memerlukan pembentukan badan-badan baru atau perombakan total lembaga-lembaga yang sudah ada. Lagi pula, usaha ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua negara ASEAN. Semua negara anggota harus mengimplementasikan paling sedikit suatu rangkaian minimal dari inisiatif-inisiatif utama, khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk mengharmonisasikan prosedur perbatasan dan standardisasi.

Pemerintah-pemerintah ASEAN harus memusatkan sumber dayanya, baik ekonomi, maupun politik, untuk menjamin bahwa fasilitasi ini tidak hanya akan mengurangi biaya transaksi, melainkan pada akhirnya juga mendukung perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

**4.Liberalisasi Sektor Jasa**

HLTF merekomendasikan integrasi jalur cepat dari empat, sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu e-ASEAN, jasa kesehatan, perjalanan udara dan pariwisata. HLTF juga merekomendasikan bahwa integrasi sektor jasa diimplementasikan melalui liberalisasi yang dipercepat bagi sektorsektor prioritas ini, pengembangan MRA yang dipercepat, dan pendorong *joint ventures* dan kerja sama, termasuk pasar negara ketiga.

Integrasi sektor jasa harus memfasilitasi prows pembangunan landasan produksi tunggal ASEAN. Inisiatif-inisiatif regional harus pula ditujukan untuk mempromosikan industri jasa berbiaya rendah tetapi berkualitas tinggi yang memungkinkan ASEAN mengembangkan diri sebagai suatu poros alih daya (*outsourcing hub*) global.

Di samping keempat sektor prioritas di atas, ASEAN harus pula mempertimbangkan untuk mempercepat sektorsektor jasa berikut:

* Jasa keuangan (seperti perbankan dan pasar modal)
* Telekomunikasi
* Jasa bisnis profesional (seperti akuntansi dan hukum)
* Logistik dan Transportasi
* Pendidikan
* Energi

Integrasi sektor jasa dapat pula dipercepat dengan memasukkan industri jasa ke dalam liberalisasi investasi di bawah AIA, yang, dipertimbangkan ASEAN.

Liberalisasi sektor jasa ini harus pula dilakukan ke luar ASEAN. Hal ini berarti bahwa AFAS harus ditinggalkan untuk suatu jalur alternatif yang lebih cepat. Salah satu solusi di sini ialah mengadopsi suatu kebijakan ASEAN bagi pem­bukaan sektor-sektor jasa prioritas secara global. Kebijakan ini dengan sendirinya berarti pula kebijakan imigrasi yang terbuka, bagi tenaga kerja profesional dan terampil.

**F.Percepatan Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean 2015**

*Cebu Declaration* pada 13 Januari 2007 (12th ASEAN *Summit*) memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan India. Beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi[[136]](#footnote-137); (ii) meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, *intelectual property rights,* dan adanya persaingan. Dengan integrasi ekonomi diharapkan infrastruktur kawasan dapat lebih berkembang bersamaan dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi. Integrasi ekonomi juga memberikan manfaat bagi sektor swasta yang terlibat selama proses berlangsung. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap 12 sektor prioritas integrasi, Sembilan di antaranya menyumbang lebih dari 50 persen perdagangan barang di ASEAN. Dengan demikian langkah percepatan integrasi ASEAN menjadi penting untuk memanfaatkan semua potensi yang ada.

Pada saat ini juga dilakukan upaya perjanjian kerja sama perdagangan antara ASEAN dan negara mitra dagang, yaitu China, India, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Semua perjanjian bilateral ASEAN tersebut pada saat realisasinya nanti diharapkan meningkatkan Skala ekonomi ASEAN dan mendukung daya saing ASEAN di pasar global. Pada akhirnya integrasi ekonomi menjadi langkah penting bagi pencapaian masyarakat ASEAN yang kuat dan berperan di masyarakat dunia. Ekonomi kawasan pada 2006 yang bernilai lebih dari USD1,1 triliun dengan populasi lebih dari 550 juta penduduk akan menjadi, tujuan yang semakin menarik bagi perdagangan dan investasi internasional.

Guna memperkuat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN melakukan transformasi "cara" kerja sama ekonomi dengan meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi basis komitmen negara ASEAN melalui penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*) pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN, cetak biru yang merupakan arah panduan MEA dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar juga disepakati. Selanjutnya komitmen tersebut menjadi arah pencapaian MEA ke depan baik bagi ASEAN secara kawasan maupun oleh individu negara anggota. Masing-masing negara berkewajiban menjaga komitmen tersebut sehingga kredibilitas ASEAN semakin baik di masa depan. Secara teknis, monitoring mencapai pencapaian MEA dilakukan ASEAN *Baseline Report.* Beberapa kelengkapan tersebut menjadikan komitmen ASEAN dalam pencapaian MEA tidak lagi bersifat “persaudaraan” tetapi mempunyai kekuatan hukum. Gambaran dari masing-masing kelengkapan MEA adalah sebagai berikut:

**1.Piagam ASEAN (ASEAN *Charter)***

Setelah 40 tahun berdirinya ASEAN, bentuk kerja sama regional semakin diperkuat dan bertransformasi dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN oleh para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Penandatangan Piagam ASEAN menjadi pratisi hasil evaluasi dari kerja sama yang bersifat “persaudaraan” menjadi organisasi yang berdasarkan suatu kerangka yang lebih kohesif berlandaskan *rule based framework.* Dengan kejelasan visi, tujuan, perbaikan struktur organisasi, pengambilan keputusan dan mekanisme *dispute settlement* serta peningkatan peran dan mandat Sekretariat ASEAN, diharapkan dapat lebih menjamin implimentasi kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang telah dicapai.

Untuk mewujudkan harapan dan keinginan bersam ASEAN, yakni hidup damai, aman, stabil, makmur dan sejahtera, Piagam ASEAN merumuskan secara detail tujuan dan prinsip ASEAN. Tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan tujuan MEA, yaitu (i) menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi; dan (ii) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di antara negara anggota melalui bantuan dan kerjasama yang saling menguntungkan.[[137]](#footnote-138) Dalam hal prinsip kerja sama, ASEAN tetap memegang teguh prinsip yang telah dianut selama ini, yang intinya menghormati kedaulatan negara lain, tidak melakukan intervensi kebijakan dalam negeri negara lain, serta melakukan konsultasi secara insentif atas berbagai permasalahan regional.

Tranformasi mendasar yang dilakukan oleh Piagam ASEAN telah memberikan *legal personality* kepada ASEAN. Kini ASEAN sebagai organisasi kerja sama antarpemerintah memiliki identitas tersendiri terpisah dari identitas negara anggota ASEAN. Sebagai *legal personality*, ASEAN beraktivitas dan membuat perjanjian atas namanya dan dapat pula menuntut dan dituntut secara hukum. Sejalan dengan transformasi ini dilakukan pula penyempurnaan kelembagaan, sehingga ASEAN diharapkan dapat merespons lebih baik berbagai permasalahan regional dan global yang semakin kompleks di masa yang akan datang.

Badan pengambil keputusan tertinggi di ASEAN adalah ASEAN *Summit Meeting* (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT), yakni forum yang terdiri dari Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota. KTT ASEAN diselenggarakan satu tahun sekali di negara yang menjadi Ketua ASEAN. Masa jabatan Ketua ASEAN berlaku satu tahun dan dirotasi berdasarkan urutan alfabet.

KTT ASEAN dibantu oleh ASEAN *Coordinating Council* yang terdiri dari menteri luar negeri ASEAN, yang melakukan pertemuan. paling sedikit 2 tahun sekali. Badan ini akan mengoordinasikan kebijakan, efisiensi dan kerja sama dalam mencapai Masyarakat ASEAN dengan ASEAN *Community Councils* yang terdiri dari (i) ASEAN *Political-Security Community* *Council*, (ii) ASEAN *Economic Community Council*, dan (iii) ASEAN Soc*io-Cultural Community Council*. Perkembangan dan rekomendasi pencapaian Masyarakat ASEAN dilaporkan kepada KTT ASEAN.

ASEAN *Sector Ministerial Bodies* merupakan badan di bawah koordinasi ASEAN *Community Councils* sesuai dengan masing-masing pilar dalam Masyarakat ASEAN. Badan ini akan melakukan kerja sama di masing-masing sektor dan mengimplementasikan keputusan-keputusan KTT ASEAN.

Dalam rangka mengefektifkan dan memfasilitasi proses integrasi dan implementasi keputusan, ASEAN *Charter* memperkuat kelembagaan ASEAN dengan meningkatkan peran dan mandat Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih dalam KTT ASEAN untuk jangka waktu lima tahun dan kemudian dirotasi di antara negara anggota ASEAN secara urutan alfabet. Sekretariat Jenderal ASEAN akan berpartisipasi dalam semua pertemuan ASEAN mulai dari KTT sampai dengan *Sector Ministerial Bodies*. Sekretariat Jenderal juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN dengan pihak eksternal. Selain tugas-tugas tersebut, Sekretariat Jenderal ASEAN juga bertindak selaku *Chief Administrative Officer of* ASEAN.

Mengingat Sekretariat ASEAN bukan lagi representasi kepentingan masing-masing negara anggota, melainkan representasi kepentingan bersama di kawasan, maka ASEAN *Charter* menetapkan pembentukan dua badan yang dapat mewakili kepentingan masing-masing negara anggota yaitu: (i) *Committee of Permanent Representatives to* ASEAN dan (ii) ASEAN National *Secretariats*.

Setiap negara anggota akan menunjuk *Committee of Permanent Representatives to* ASEAN yang kedudukannya setingkat Duta Besar. *Committee of Permanent Representative* antara lain bertugas mendukung tugas ASEAN *Community Councils* dan ASEAN *Sector* *Ministerial* *Bodies* Berta melakukan koordinasi dengan ASEAN *National Secretariat*. Badan terakhir ini berfungsi melakukan koordinasi tingkat nasional di masing-masing negara dan menjadi *national focal point.* Komitmen dan mekanisme baru kelembagaan ASEAN telah memberikan keyakinan yang lebih besar bagi keberhasilan pencapaian tujuan ASEAN. Namun di sisi lain komitmen tersebut menuntut setiap anggota, termasuk Indonesia, untuk segera mempersiapkan diri, dari sisi kebijakan, kelembagaan maupun sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam memberi arah dan warna kerja sama ASEAN di masa depan.

**2.Cetak Biru dan Jadwal Strategis MEA 2015**

Bersamaan dengan, ditandatangani ASEAN *Charter*, para pernimpin ASEAN juga menandatangani cetak biru MEA 2015 yang merupakan grand design MEA yang berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar MEA. Target waktu pencapaian MEA terbagi dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014- 2015. Cetak biru ini menjadi arah bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015. Masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN.

Mengingat pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan strategi pembangunan ekonomi di negara ASEAN yang *outward looking*, cetak biru MEA memuat empat kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce.*
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for* ASEAN *Integration*.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Keempat pilar MEA saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/negara lain, maupun antar individu anggota. Untuk itu, kesenjangan pembangunan ekonomi antara negara anggota harus diperkecil sehingga *playing field* antar negara anggota menjadi setara. Hal ini perlu dilakukan mengingat globalisasi dapat memperbesar kesenjangan pembangunan yang secara potensial dapat menciptakan kerenggangan dan memperlemah solidaritas ASEAN. Manfaat integrasi yang dirasakan oleh seluruh anggota akan menjamin integrasi ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai basis produksi internasional, maka pasar ASEAN yang terintegrasi secara penuh dengan pasar global menuntut pula koordinasi kebijakan eksternal antara negara anggota ASEAN.

Keterkaitan keempat pilar MEA tersebut membutuhkan koordinasi, konsistensi dan kesatuan arah elemen-elemen dari setiap pilar, dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap implementasi. Untuk menjamin hal tersebut maka keempat pilar perlu didukung oleh riset, *capacity building* dan efektivitas kelembagaan ASEAN, serta komitmen kuat tiap negara.

Khusus untuk pencapaian pilar pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kelima elemen yang digunakan untuk pencapaiannya juga terkait erat dan saling mendukung antara satu dengan lainnya. Dalam kerangka pasar tunggal ASEAN, aliran barang dan jasa yang bebas di kawasan akan mendorong efisiensi produksi kawasan dalam kerangka *supply chain*. Kondisi tersebut akan membuka peluang lebih besar investasi lintas batas di dalam kawasan. Aliran bebas investasi akan membutuhkan aliran bebas tenaga kerja dan aliran modal yang lebih bebas, sebagai faktor produksi. Sebaliknya, aliran bebas investasi akan meningkatkan arus barang dan jasa yang digunakan sebagai bahan baku maupun produk akhir.

Secara teknis pencapaian MEA 2015 menggunakan mekanisme dan inisiatif yang telah dibentuk oleh ASEAN selama ini yang diperkuat dengan penguatan institusi dalam kerjasama ASEAN. Masing-masing institusi dan inisiatif yang terlibat di lima elemen pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Sebagai contoh, untuk elemen aliran bebas barang, inisiatif penurunan tarif dan non-tarif Berta fasilitasi perdagangan menuju aliran bebas barang MEA 2015 didasarkan pada perkembangan dan penyempurnaan mekanisme yang ada mulai dari Prefential Tarif Arrangement (PTA), ASEAN *Free Trade Area* dan dilanjutkan oleh konsep cetak biru MEA. Hal yang sama juga terjadi untuk elemen-elemen lainnya di dalam pilar ini.

Cetak biru MEA juga memuat pedoman umum implementasi MEA yang dituangkan dalam jadwal strategis (Lampiran I). Implementasi MEA didasarkan pada prinsip "*open, outward-looking*, *inclusive* and *market-driven*" dengan memerhatikan perbedaan tingkat pernbangunan dan kesiapan anggota ASEAN melalui penerapan formulasi ASEAN minus negara X. Untuk menjamin pelaksanaan atas komitmen yang telah disepakati, terdapat prinsip tidak diperbolehkannya penarikan komitmen (*no back-loading of commitments*) dan terdapat fleksibilitas atas beberapa hal yang harus diajukan di awal perundingan serta disetujui bersama (*pre-agreedflexibility*).

5. **ASEAN *Baseline Report***

Dalam rangka memantau kemajuan implementasi MEA disusun ASEAN *Baseline Report* (ABR) yang berperan sebagai *scorecard* dengan indikator kinerja utama yang dilaporkan setiap tahun oleh Sekretaris jenderal ASEAN kepada para menteri dan kepala negara/pemerintahan semua negara ASEAN. ABR memuat kondisi dasar yang menjadi acuan evaluasi implementasi tiga pilar Masyarakat ASEAN (Keamanan, Ekonomi dan Sosial-Budaya), ukuran kemajuan kerjasama regional, dan panduan dalam mempersempit gap pembangunan antarnegara anggota. Tahun dasar yang digunakan adalah kondisi dan situasi ASEAN pada 2003, saat Bali *Concord* II dideklarasikan. Dengan ABR, antisipasi perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pencapaian ASEAN *Community* dapat dilakukan sedini mungkin.

Secara teknis, ABR menyediakan analisis kuantitatif dengan indikator terpilih yang memenuhi kriteria: (a) memiliki relevansi tcrhadap kebijakan, (b) sederhana, (c) konsisten secara statistik, (d) valid, (e) ketersediaan data dan (f) cakupan indikator. Berbagai indikator tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: indikator proses (*process indicators*), indikator output (*output indicators*) dan indikator hasil (*outcome indicators*), yang kemudian disusun menjadi indeks tingkat negara dan kawasan. Indeks tingkat negara digunakan untuk perbandingan antarnegara dalam pencapaian tujuan Masyarakat ASEAN. Sementara, indeks level kawasan digunakan untuk menilai kinerja secara keseluruhan kawasan pada setiap tujuan Masyarakat ASEAN.

Dalam pilar ekonomi, ABR menilai tingkat integrasi ekonomi di kawasan dalam perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan jasa pendukung seperti keuangan, informasi, teknologi komunikasi, transportasi serta infrastruktur. Sebagai contoh indikator integrasi perdagangan yang digunakan secara umum adalah: (i) perdagangan intra-ASEAN sebagai persentase dari total perdagangan, dan (ii) perdagangan intra-ASEAN sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun dasar 2003, perdagangan intra-ASEAN mencapai 22,1 persen dari total perdagangan ASEAN dibandingkan dengan 67,3 persen di Uni Eropa, 44,6 persen di NAFTA dan 14,9 persen di MERCOSUR. Sementara, pangsa perdagangan intra-ASEAN sebagai persentase PDB rata-rata mencapai sekitar 25 persen. Nilai tersebut di EU, NAFTA dan MERCOSUR masing-masing mencapai 38,5 persen, 10,3 persen dan 4,1 persen.

Kredibilitas penyusunan ABR ini sangat bergantung pada ketersediaan data di setiap sektor dan kernampuan setiap negara dalam penyusunan statistik dan manajemen *database*. Dengan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda, harmonisasi definisi variabel dan metode statistik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

**Rekomendasi Awal yang Dirumuskan HLTF**

*High Level Task Force* (HLTF) adalah unit kerja yang dibentuk guna merumuskan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai MEA, baik terkait dengan upaya liberalisasi maupun fasilitasi yang diperlukan. Rekomendasi tersebut terdiri dari langkah penguatan inisiatif yang sudah ada.

1. Langkah Penguatan Inisiatif Kerja sama yang sedang berlangsung

* **Dibidang Perdagangan Barang**

Guna mencapai arus perdagangan barang yang bebas antar kawasan maka diperlukan finalisasi konsep *Rule of Origin* (ROO); kejelasan langkah eliminasi hambatan non-tarif (*Non-Tarif Measures*); harmonisasi di kepabeanan (termasuk implementasi ASEAN *Single Window* untuk memproses elektronik dokumen perdagangan); percepatan implementasi *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs) untuk lima sektor prioritas (peralatan listrik, kosmetik,farmasi, telekomunikasi, peralatan dan makanan jadi) dan sektor potensial lainnya; serta harmonisasi standar dan peraturan teknis lainnya.

* **Perdagangan Jasa**

Menggunakan pendekatan ASEAN-X formula dalam proses liberalisasi perdangan jasa; menyelesaikan MRAs untuk kualifikasi tenaga ahli dalam mendukung liberalisasi tenaga kerja ahli; serta melakukan serangkaian proses negosiasi guna pencapaian arus perdagangan jasa yang bebas di 2020

* **Investasi**

Menerapkan ASEAN-X formulasi dalam mempercepat pembukaan sektor yang masuk ke dalam *sensitive list;* membangun jaringan antara kawasan perdagangan bebas ASEAN (*free trade zone*); dan upaya untuk meningkatkan aliran penanaman modal langsung (FDI) ke kawasan.

* ***Intellectual Prooerty Reights* (IPRs)**

Peningkatan kerja sama ASEAN yang lebih jauh dari *trademark* dan hak paten termasuk dibidang hak cipta (pertukaran informasi dan penerapan).

* **Aliran Modal**

Untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dan mempercepat implementasi roadmap integrasi ASEAN di bidang keuangan.

1. Langkah Inisiatif Baru

* Mempercepat integrasi 11 sektor prioritas dengan negara koordinator, yaitu:
* Indonesia: produk berbahan kayu dan automotif,
* Malasyia: produk berbahan karet, tekstil, dan produknya,
* Myanmar: produk berbasis pertanian dan perikanan,
* Filipina: elektronika,
* Singapura: e-ASEAN dan perawatan kesehatan,
* Thailand: perjalanan udara dan turis.
* Pendekatan proses integrasi disektor prioritas didasarkan pada memadukan kekuatan individu negara guna keuntungan kewasan; memfasilitasi dan mendukung investasi intra-ASEAN; mempromosikan produk dan jasa “*made in* ASEAN”.
* Menyusun *roadmap* untuk masing-masing sektor dengan memerhatikan keterlibatan sektor swasta.
* Menyusun langkah-langkah percepatan liberalisasi di perdagangan barang dan jasa.
* Memfasilitasi pergerakan terkait dengan bisnis dan pariwisata.

1. Langkah Penguatan Institusi

* Memperkuat mekanisme pengambilan keputusan di forum/unit yang telah dibentuk, seperti AEM (ASEAN *Economic Minister*) dalam mengordinasikan isu terkait dengan kerja sama dan integrasi keuangan, SEOM (*Senior Economist Officials Meeting*) untuk isu terkait teknikal/oprasional.
* Membentuk sistem yang efetif (*advisory*,konsultasi, dan mekanisme *adjudicatory*) guna menjamin pelaksanaan komitmen dan mempercepat penyelesaian sengketa.
* Meningkatkan kapasitas Sekretariat ASEAN dalam melakukan studi terkait dengan perdagangan, investasi dan keuangan

1. Diseminasi

* Meningkatkan kesadaran dan pemahaman isu ekonomi ASEAN pada dunia usaha, investor, maupun agen pemerintah.

1. Pembangunan dan Kerja sama Teknis

* Diperlukan upaya untuk penyamaan tingkat pembangunan dan percepatan integrasi ekonomi Negara CLMV.

A. Komunitas Ekonomi ASEAN

F. Undang-undang Dasar 1945

**DAFTAR PUSTAKA**

**REFERENSI**

Abdul Muthalib Tahar, Hukum Internasional dan perkembangannya: PKKPUU FH UNILA Bandar Lampung 2016.

Asian Forum and Human Rights Development, *Rights Now: A Training Manual on ASEAN Human Rights Mechanism*, Hand Out Material 1.1.2 Associations of Southeast ASEAN Nations (ASEAN), Thailand, 2010.

Boer Mauna, Hukum Internasional pengertian, peran dan fungsi dalam era dinamika global, PT Alumni Bandung, Bandung, 2015.

Dominick Mc Goldrick, The Human Rights Committee: Its Role in the Development of The International Covenant on Civil and political Rights, Oxford: Clarendon Press,1994.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (DEPLU RI), *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta.

Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional, *Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jakarta, 2011.

Gamani core,”United Nations Conference on Trade and Development”,dalam R. Bernhardt, (ed)., Encyclopedia of Public International law, Instalment 5, 1983.

Gofar Bain, *Uruguway Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan,* Djambatan Universitas Indinesia Press, Jakarta, 2001.

Hans Kelsen, General theory of Law and State, Cambridge: Harvard U.P., 1949.

Hatta., *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum),* Refika Aditama,Bandung, 2006.

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional suatu pengantar*, CV Keni Media, Bandung, 2011.

H.Golsong,’ International bank Recontruction and Development, dalam R. Bernhardt, (ed)., EPIL, Instalment 5 (1983).

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional,* RajaWali Pres, Jakarta, 2005.

Iman Prihandono,“Status dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) dalam Hukum International“, *Global&Strategis*, Th.II,No.1, Januari-Juni 2008.

I.A. Shearer, “Association of south-East Asian Nations,” dalam R.Bernhardt(ed.), Encyclopedia of Public International Law,Instalment 6,1983.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

John O’Brien, *International Law,* Cavandish Publishing Limited, London, 2001.

Jawahir Thontow dan pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontrmporer : cetakan pertama 2006.

Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.

Mochtar Kusumaadmaja, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. Alumni Bandung*. 2001.*

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty.R.Agoes, *Hukum Internasional suatu Pengantar,* Alumni Bandung, Bandung. 2001.

McKinsey & Company. 2003. ASEAN *Competitiveness Study*. ASEAN *Secretariat*.

N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Paul J. Davidson, The Legal Framework for International Economic relations,Singapore: Institute of Southeast Asian nations, 1997.

Peter Van den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World trade Organization),* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Schwarzenberger, A Manual of international law, London: stevens and Sons,6th.ed.,1976.

Taryana Sunandar, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization),* Badan Pembinaan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.

Thamnat Konan, ASEAN: Conception and Evolution, www.Aseansec.org.

Yusnani H Zoem, Sistem Pemerintahan Asean. Justice Publisher. Bandar Lampung.

2014.

**KETENTUAN INTERNASIONAL**

*Agreement Establishing The World Trade Organization, 1994*

*Agreement the international bank for Reconstruction and Development.*

ASEAN *Charter*

GATT 1994

GATT 1947

*Disspute Settlement*

**JURNAL dan KARYA ILMIAH**

Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, *Diplomasi Indonesia Dalam Perundingan Doha Development agenda-WTO,* Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

M. Pangestu, "*Opportunities and Challenges for ASEAN Engaging in the Process of Establishing ASEAN Economic Community*", paper presented at the regional seminar: ASEAN Economic Community: Prospects and Challenges", Hanoi, Vietnam, 26 Agustus, 2003.

**WEBSITE**

<http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pdf>

http://asean.org/asean/asean-member-states/

<http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pdf>

http://asean.org/asean/asean-charter/translations-of-the-asean-charter/

www.UNCTAD.org

David P Fidler, *Subjects of international law and GPGH*<http://www.who.int/trade/distance_learning/gpgh/gpgh7/en/index3.html>.

Richard K.Gardiner, International Law, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35625/Chapter%20II.pdf;sequence=3.

Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Sejarah ASEAN*, dapat dilihat di http://www.kemlu.go.id/pages/Asean.aspx?IDP=6&I=id

Dapat dilihat di <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fleeyaleeyut.files.wordpress.com%2F2010%2F10%2Fasean-part-2.doc&ei=5RgPU_6fEsaErgfsm4GoAw&usg=AFQjCNFpSHJmAEBjXPjQLTb08ebTO7JIyA&sig2=k4zx6AEt2a1xQwu94uVGRA>.

Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Sejarah ASEAN*, dapat dilihat di http://www.kemlu.go.id/pages/Asean.aspx?IDP=6&I=id.

http://www.asean.org/asean/asean-structure.

https://www.wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/inbrief\_e/inbr00\_e.htm.

Syahmin AK, *Aspek Negatif-Positif DSU WTO*. Dalam majalah ilmiiah Fakultas Hukum UNSRI Simbur Cahaya No.38 Tahun XIII Januari 2009.

<https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm>

<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#Understanding>

<https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm>

<https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm>

Hikmahanto, Kuliah Hukum Internasional I, diunduh melalui <https://www.google.co.id/search?q=hikmahanto+subjek+hukum+internasional&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_7JS9uLrWAhVLH5QKHam6CkMQBQgjKAA&biw=1440&bih=786>.

www.WTO.org

https://www.wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/tif\_e/org3\_e.htm

https://www.law.berkeley.edu/library/dynamic/guide.php?id=57

https://www.wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/tif\_e/org6\_e.htm

Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional : suatu pengantar,cetakan ke-5.

www.worldbank.org

https://www.wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/who\_we\_are\_e.htm

www.kemlu.go.id

1. Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm.1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Bandung: Keni Media, 2005, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-3)
3. Huala Adolf, *Op., Cit,*, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-4)
4. Meria Utama,  *Op.,Cit,* hlm.3 [↑](#footnote-ref-5)
5. N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 11 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid ,.* hlm 18 [↑](#footnote-ref-7)
7. N. Rosyidah*, Op.,Cit,* hlm. 9 [↑](#footnote-ref-8)
8. Meria Utama,  *Op.,Cit,* hlm.4 [↑](#footnote-ref-9)
9. N. Rosyidah*, Op.,Cit,* hlm.66-68 [↑](#footnote-ref-10)
10. Huala Adolf, *Op., Cit,*, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-11)
11. Hikmahanto, Kuliah Hukum Internasional I, diunduh melalui <https://www.google.co.id/search?q=hikmahanto+subjek+hukum+internasional&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_7JS9uLrWAhVLH5QKHam6CkMQBQgjKAA&biw=1440&bih=786>, pada tanggal 23 September 2017 [↑](#footnote-ref-12)
12. J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hl. 91 [↑](#footnote-ref-13)
13. Mochtar Kusumaadmaja, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, [↑](#footnote-ref-14)
14. H.Golsong,’ International bank Recontruction and Development, dalam R. Bernhardt, (ed).,EPIL,Instalment 5(1983),hlm.58. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Articles of Agreement the international bank for Reconstruction and Development.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Huala Adolf., *ibid*,.hlm.78 [↑](#footnote-ref-17)
17. www.worldbank.org [↑](#footnote-ref-18)
18. https://www.wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/who\_we\_are\_e.htm [↑](#footnote-ref-19)
19. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional,* RajaWali Pres, Jakarta, 2005, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-20)
20. Peter Van den Bossche dkk, *Pengantar Hukum WTO (World trade Organization),* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.xi. [↑](#footnote-ref-21)
21. Gofar Bain, *Uruguway Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan,* Djambatan Universitas Indinesia Press, Jakarta, 2001, hlm.99. [↑](#footnote-ref-22)
22. Mukadimah *Agrement Estabilishing The World Trade Organization* 1994. [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, *Diplomasi Indonesia Dalam Perundingan Doha Development agenda-WTO,* Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.55. [↑](#footnote-ref-24)
24. Hatta., *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum),* Refika Aditama,Bandung, 2006, hlm.88. [↑](#footnote-ref-25)
25. www.WTO.org [↑](#footnote-ref-26)
26. https://www.wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/tif\_e/org3\_e.htm [↑](#footnote-ref-27)
27. https://www.law.berkeley.edu/library/dynamic/guide.php?id=57 [↑](#footnote-ref-28)
28. https://www.wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/tif\_e/org6\_e.htm [↑](#footnote-ref-29)
29. Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional : suatu pengantar,cetakan ke-5.hlm.96. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
31. Peter Van Den Bossche dkk., *Op.cit.,* hlm.93. [↑](#footnote-ref-32)
32. Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, *Op.cit.,*hlm.56. [↑](#footnote-ref-33)
33. Peter Van Den Bossche dkk., *Op.cit.,*hlm.93. [↑](#footnote-ref-34)
34. Taryana Sunandar, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization),* Badan Pembinaan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.hlm.128. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
37. Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional : suatu pengantar,cetakan ke-5.hlm.96. [↑](#footnote-ref-38)
38. www.kemlu.go.id [↑](#footnote-ref-39)
39. I.A. Shearer, “Association of south-East Asian Nations,” dalam R.Bernhardt(ed.), Encyclopedia of Public International Law,Instalment 6,1983,hlm.25;Thamnat Konan, ASEAN: Conception and Evolution, www.Aseansec.org. [↑](#footnote-ref-40)
40. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional:suatu pengantar*,2011,cetakan ke-5,hlm. 97 [↑](#footnote-ref-41)
41. Paul J. Davidson, The Legal Framework for International Economic relations,Singapore: Institute of Southeast Asian nations, 1997, hlm.13; Thanat Konan,OP.cit.,hlm.2. [↑](#footnote-ref-42)
42. Paul J.Davidson,ibid,hlm.14 [↑](#footnote-ref-43)
43. Huala Adolf, *ibid*,hlm.99 [↑](#footnote-ref-44)
44. I.A. Shearer,op.cit.,hlm.26. [↑](#footnote-ref-45)
45. I.A. Shearer,Op.cit.,hlm.26. [↑](#footnote-ref-46)
46. I.A. Shearer,Op.cit.,hlm.26. [↑](#footnote-ref-47)
47. Huala Adolf,ibid,.hlm.99 [↑](#footnote-ref-48)
48. Huala Adolf,ibid,.hlm.100 [↑](#footnote-ref-49)
49. I.A. Shearer,op.cit.,hlm.26. [↑](#footnote-ref-50)
50. I.A. Shearer,op.cit.,hlm.26. [↑](#footnote-ref-51)
51. I.A. Shearer,op.cit.,hlm.26. [↑](#footnote-ref-52)
52. <http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pdf> [↑](#footnote-ref-53)
53. http://asean.org/asean/asean-member-states/ [↑](#footnote-ref-54)
54. Huala Adolf.,ibid,hlm.104 [↑](#footnote-ref-55)
55. Paul J.Davidson,op,cit,hlm.32. [↑](#footnote-ref-56)
56. <http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pdf> [↑](#footnote-ref-57)
57. http://asean.org/asean/asean-charter/translations-of-the-asean-charter/ [↑](#footnote-ref-58)
58. www.UNCTAD.org [↑](#footnote-ref-59)
59. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional:suatu pengantar*,2011,cetakan ke-5,hlm. 89. [↑](#footnote-ref-60)
60. www.UNCTAD.org [↑](#footnote-ref-61)
61. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional:suatu pengantar*,2011,cetakan ke-5,hlm. 89. [↑](#footnote-ref-62)
62. www.UNCTAD.org [↑](#footnote-ref-63)
63. Huala Adolf,ibid.hlm.89 [↑](#footnote-ref-64)
64. ibid [↑](#footnote-ref-65)
65. Ibid.hlm.90 [↑](#footnote-ref-66)
66. Gamani core,”United Nations Conference on Trade and Development”,dalam R. Bernhardt, (ed)., Encyclopedia of Public International law, Instalment 5, 1983,hlm.301; Jackson, op.cit.,hlm.275-276. [↑](#footnote-ref-67)
67. Huala adolf.ibid.hlm.90 [↑](#footnote-ref-68)
68. ibid [↑](#footnote-ref-69)
69. www.UNCTAD.org [↑](#footnote-ref-70)
70. Abdul Muthalib Tahar, Hukum Internasional dan perkembangannya: PKKPUU FH UNILA Bandar Lampung 2016, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-71)
71. J.G Starke, [↑](#footnote-ref-72)
72. Malcolm N. Shaw, International….Hlm.183 [↑](#footnote-ref-73)
73. Jawahir Thontow dan pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontrmporer : cetakan pertama 2006,hlm.120. [↑](#footnote-ref-74)
74. Dominick Mc Goldrick, The Human Rights Committee: Its Role in the Development of The International Covenant on Civil and political Rights, Oxford: Clarendon Press,1994. [↑](#footnote-ref-75)
75. Hans Kelsen, General theory of Law and State, Cambridge: Harvard U.P., 1949, hlm.93 [↑](#footnote-ref-76)
76. Hans kelsen,ibid,hlm.95 [↑](#footnote-ref-77)
77. Schwarzenberger, A Manual of international law, London: stevens and Sons,6th.ed.,1976,hlm.102 [↑](#footnote-ref-78)
78. Huala Adolf, Hukum Ekonomi International, cetakan ke-5 ,hlm.61. [↑](#footnote-ref-79)
79. Huala Adolf,ibid,hlm.61 [↑](#footnote-ref-80)
80. Huala adolf,ibid,hlm.62 [↑](#footnote-ref-81)
81. David P Fidler, *Subjects of international law and GPGH*<http://www.who.int/trade/distance_learning/gpgh/gpgh7/en/index3.html>, diakses pada 8 Agustus 2017, Pukul 13.20 [↑](#footnote-ref-82)
82. ibid., [↑](#footnote-ref-83)
83. ImanPrihandono,“StatusdanTanggungJawabMulti-NationalCompanies(MNCs)dalamHukumInternational“,*Global&Strategis*,Th.II,No.1,Januari-Juni2008,hlm.69-84 [↑](#footnote-ref-84)
84. Boer mauna, Hukum Internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global, Bandung: PT Alumni,2011,hlm.56. [↑](#footnote-ref-85)
85. John O’Brien, *International Law,* Cavandish Publishing Limited, London, 2001, hlm. 70 [↑](#footnote-ref-86)
86. Huala Adlof, Op., Cit, hlm. 139 [↑](#footnote-ref-87)
87. ibid., [↑](#footnote-ref-88)
88. Bour Mauna, Hukum Internasional pengertian, peran dan fungsi dalam ra dinamika global, PT Alumni Bandung, Bandung, 2015, hlm 11 [↑](#footnote-ref-89)
89. Huala Adlof, Op.Cit., hlm. 140 [↑](#footnote-ref-90)
90. ibid., [↑](#footnote-ref-91)
91. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional suatu pengantar*, CV Keni Media, Bandung, 2011, hlm, 141 [↑](#footnote-ref-92)
92. ibid., [↑](#footnote-ref-93)
93. ibid., [↑](#footnote-ref-94)
94. ibid., [↑](#footnote-ref-95)
95. ibid., [↑](#footnote-ref-96)
96. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty.R.Agoes, *Hukum Internasional suatu Pengantar,* Alumni Bandung, Bandung 2001, hal. 154. [↑](#footnote-ref-97)
97. Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary.hal. 457. [↑](#footnote-ref-98)
98. Richard K.Gardiner, International Law, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35625/Chapter%20II.pdf;sequence=3, diunduh 5 September 2017, Pukul 20.30 Wib [↑](#footnote-ref-99)
99. https://www.wto.org/english/thewto\_e/whatis\_e/inbrief\_e/inbr00\_e.htm. [↑](#footnote-ref-100)
100. Syahmin AK, *Aspek Negatif-Positif DSU WTO*. Dalam majalah ilmiiah Fakultas Hukum UNSRI Simbur Cahaya No.38 Tahun XIII Januari 2009. [↑](#footnote-ref-101)
101. <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm> [↑](#footnote-ref-102)
102. Gatt 1994 (lihat juga gatt 1947) [↑](#footnote-ref-103)
103. Article XXII dan XXIII GATT 1994 dan Artikel 4 DSU [↑](#footnote-ref-104)
104. Articlel 4(3) DSU [↑](#footnote-ref-105)
105. <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#Understanding> [↑](#footnote-ref-106)
106. <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm> [↑](#footnote-ref-107)
107. Article 2(1) DSU [↑](#footnote-ref-108)
108. Article 8(1) DSU [↑](#footnote-ref-109)
109. Article 8(9) DSU [↑](#footnote-ref-110)
110. Article 11(1) DSU [↑](#footnote-ref-111)
111. Article 17(1) DSU [↑](#footnote-ref-112)
112. Article 17(3) DSU [↑](#footnote-ref-113)
113. Article 17(13) DSU [↑](#footnote-ref-114)
114. Article (5) DSU [↑](#footnote-ref-115)
115. <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm> [↑](#footnote-ref-116)
116. Yusnani H Zoem, Sistem Pemerintahan Asean. Justice Publisher. Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-117)
117. 2014. hlm.7

     Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (DEPLU RI), *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta. Hlm 2. [↑](#footnote-ref-118)
118. *Ibid,*hlm. 2. [↑](#footnote-ref-119)
119. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-120)
120. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-121)
121. Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Sejarah ASEAN*, dapat dilihat di http://www.kemlu.go.id/pages/Asean.aspx?IDP=6&I=id [↑](#footnote-ref-122)
122. Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional, *Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jakarta, 2011, hlm 4. [↑](#footnote-ref-123)
123. Asian Forum and Human Rights Development, *Rights Now: A Training Manual on ASEAN Human Rights Mechanism*, Hand Out Material 1.1.2 Associations of Southeast ASEAN Nations (ASEAN), Thailand, 2010, hlm 12. [↑](#footnote-ref-124)
124. DEPLU RI, *op.cit*., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-125)
125. Dapat dilihat di https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fleeyaleeyut.files.wordpress.com%2F2010%2F10%2Fasean-part-2.doc&ei=5RgPU\_6fEsaErgfsm4GoAw&usg=AFQjCNFpSHJmAEBjXPjQLTb08ebTO7JIyA&sig2=k4zx6AEt2a1xQwu94uVGRA [↑](#footnote-ref-126)
126. Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Sejarah ASEAN*, dapat dilihat di http://www.kemlu.go.id/pages/Asean.aspx?IDP=6&I=id, *op,cit.* [↑](#footnote-ref-127)
127. http://www.asean.org/asean/asean-structure [↑](#footnote-ref-128)
128. DEPLU RI, *op.cit*., hlm 3. [↑](#footnote-ref-129)
129. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-130)
130. *Ibid,* hlm. 13 [↑](#footnote-ref-131)
131. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-132)
132. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-133)
133. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-134)
134. *Ibid* [↑](#footnote-ref-135)
135. M. Pangestu, "Opportunities and Challenges for ASEAN Engaging in the Process of Establishing ASEAN Economic Community", paper presented at the regional seminar: ASEAN Economic Community: Prospects and Challenges", Hanoi, Vietnam, 26 Agustus, 2003. [↑](#footnote-ref-136)
136. McKinsey & Company. 2003. ASEAN *Competitiveness Study*. ASEAN *Secretariat*. [↑](#footnote-ref-137)
137. ASEAN *Charter. Chapter 1-To create a single marker and production base which is stabile, prosperous, bighty competive and economically integrated with effective fasilitation for trade and investmen in which there is free flow of goods, sevices and investment; fasilitated movement of business persons, professionals, talents and labar; and free of capital, and ti alleviate poverty and narrow the development gap within* ASEAN *trough mutual assistance and copperation.* (paragraf 5 dan 6). [↑](#footnote-ref-138)